



**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

FEBRUARI ZENDRATO
1715100321

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FEBRUARI ZENDRATO
NPM : 1715100321
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2015-2019.

Medan, Agustus 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

DEKAN



Dr. Ony Medaline, SH, M.Kn

PEMBIMBING I

Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si

PEMBIMBING II

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : FEBRUARI ZENDRATO
NPM : 1715100321
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2015-2019.

Medan, Agustus 2021

KETUA

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

ANGGOTA I

Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si

ANGGOTA II

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA III

Junawan SE., M.Si

ANGGOTA IV

Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FEBRUARI ZENDRATO
NPM : 1715100321
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2015-2019.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil tulisan saya sendiri dan bukan merupakan hasil tulisan orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, dan mempublikasikan hasil karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2021

(Februari Zendrato)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FEBRUARI ZENDRATO
NPM : 1715100321
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2015-2019.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2021



(Febuari Zendrato)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: FEBRUARI ZENDRATO

Tanggal/Tgl. Lahir

: SISOBAHILI I TANOSEO / 04 Februari 1997

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1715100321

Program Studi

: Akuntansi

Konentrasi

: Akuntansi Sektor Publik

Nilai Kredit yang telah dicapai

: 127 SKS, IPK 3,48

Nomor Hp

: 081269083598

yang ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

:

Judul

Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-20190

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Medan, 16 Januari 2021

Rektor,

Pemohon,



(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

(Februari Zendrato)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 8 Februari 2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Anggi Pratama nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 9 Februari 2021

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Akuntansi

(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal : 9 Februari 2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

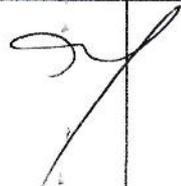
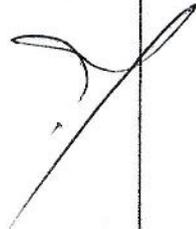
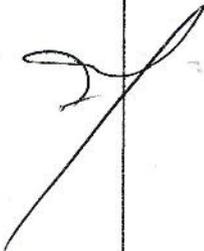
(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
 Nama Mahasiswa : FEBRUARI ZENDRATO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100321
 Bidang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05 - 2021	- Revisi Pembahasan		
	- Revisi Kesimpulan		
	- Acc Sidang Skripsi		
	PB 1 Anggi Pratama Nasution Se.Msi		

Medan, 27 Mei 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si
Dosen Pembimbing II : Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
Nama Mahasiswa : FEBRUARI ZENDRATO
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100321
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/5-2021	Perbaikan materi dempro	<i>[Signature]</i>	
21/5-2021	Sinkronkan antara Rumusan masalah dgn Hasil & Pembahasan.	<i>[Signature]</i>	
21/5-2021	Acc Sidang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, 27 Mei 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Anggi Pratama Nasution SE.Msi.
 Dosen Pembimbing II : Dr. Fatma b. Purba SE.Msi.Ak.PA.
 Nama Mahasiswa : FEBRUARI ZENDRATO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100321
 Bidang Pendidikan : S.
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias
Tahun 2015-2019

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14/04/2021.	- Rumusan Masalah. & perbaikan - Daftar Isi dirapikan. - Mengetik penditikan - Daftar Pustaka & parafiteki - Kutipan & sinkronisasi.		
17/04 - 2021.	Acc Sempro.		

Medan, 16 Maret 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

 Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Anggi Pratama Nasution SE, MS
Dosen Pembimbing II : Dr. Rahima br. Purba SE, MS, Ak. CA
Nama Mahasiswa : FEBRUARI ZENDRATO
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100321
Mata Kuliah : SI
Materi Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03 - 2021	Perbaikan latar belakang. Perbaikan Kerangka Konseptual		
03 - 2021	- Revisi Teknik Analisis Deskriptif Sajikan bagikan dgn teori, literatur, dan PS		
03/2021	Revisi Lembar Pengantar PS & Anggi		

Medan, 16 Maret 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko,

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 187/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: FEBRUARI ZENDRATO

: 1715100321

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Juli 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01

: 01

Ekstif : 04 Juni 2015

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 7/31/2021 10:02:21 AM

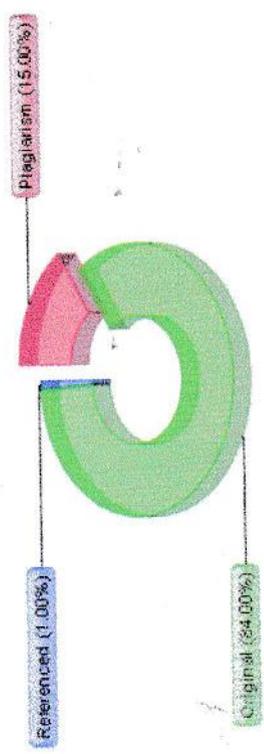
Analyzed document: FEBRUARI ZENDRATO_1715100321_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License02

- 1 Comparison Preset: Rewrite 2 Detected language:
- 3 Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

2 Relation chart



2 Distribution graph



ACA Jud 1ux
symp 2
22/10/21
Asy

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

FEBRUARI ZENDRATO
1715100321

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 Agustus 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRUARI ZENDRATO
Tempat/Tgl. Lahir : SISOBAHILI I TANOSEO / 4 Februari 1997
Nama Orang Tua : SONDRARA ZENDRATO
N. P. M : 1715100321
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081269083598
Alamat : Jl. Pramuka No 2 Kel. Cinta Damai, Kec. Medan
Helvetia, Kota Medan

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019, Selanjutnya saya menyatakan :

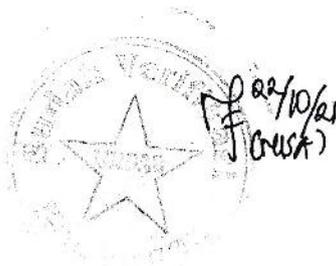
1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Hormat saya



Dit. Denny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

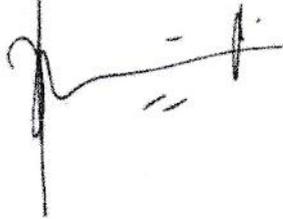
FEBRUARI ZENDRATO
1715100321

Referensi :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Acc jilid lay

22/10-2021



**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

FEBRUARI ZENDRATO

1715100321

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019. Data penelitian dimuat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio ketergantungan, dan derajat desentralisasi. Hasil penelitian secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias kurang baik atau belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, derajat kontribusi BUMD berfluktuatif, rasio keserasian menurun dimana tidak seimbang antara alokasi belanja operasi dengan belanja modal, untuk rasio pertumbuhan pendapatan cukup baik, rasio ketergantungan sangat tinggi dan derajat desentralisasi kurang.

Kata kunci: Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the regional financial performance of Nias Regency in 2015-2019. This research uses a descriptive quantitative method. The data used is secondary data form of the 2015-2019 Nias Regency Regional Budget Realization Report. The findings of the study were made public from the Central Bureau of Statistics of North Sumatra Province. Furthermore, the data were analyzed using financial ratios, namely the ratio of regional financial independence, degree of BUMD contribution, compatibility ratio, growth ratio, dependency ratio, and degree of decentralization. Overall, the financial performance of the Nias Regency Government was not well, according to the findings of the report. The trend indicates by the very weak average self-reliance ratio with an instructive relationship pattern, the degree of BUMD's contribution fluctuates, the harmony ratio decreases where the unbalance between the allocation of operating expenditure and capital expenditure, for the income growth ratio is quite good, the dependency ratio is very high, and the degree of decentralization is low.

Keywords: Regional Financial Ratios, Regional Financial Performance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019”**. Penulis skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan motivasi, bimbingan serta fasilitas dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak DR. H. Muhamad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

6. Teristimewa untuk orang tua penulis, ayahanda Sondra'aro Zendrato dan Ibunda Atiria Hura serta seluruh keluarga yang telah senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan pengarahan, pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
8. Saudara/I terkasih, KPPR ONKP Faomasi yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman akuntansi serta semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, teknik penyusunan, isi, maupun tata bahasa dan kerapiannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dan telah mendukung atas penyelesaian skripsi ini.

Medan, Agustus 2021
Penulis

FEBRUARI ZENDRATO
NPM 1715100321

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT	iv
HALAMAN PERNYATAAN SIDANG	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang masalah	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Batasan Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.1.2. Teori Kinerja	12
2.1.3. Teori Kinerja Keuangan Daerah.....	13
2.1.4. Pengertian Pemerintahan Daerah	16
2.1.5. Analisis Rasio Keuangan Daerah	19
2.2. Penelitian Sebelumnya	27
2.3. Kerangka Konseptual	30

BAB III	METODE PENELITIAN	33
	3.1. Pendekatan Penelitian.....	33
	3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
	3.3. Jenis dan Sumber Data	34
	3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
	3.5. Teknik Pengumpulan Data	37
	3.6. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	4.1. Hasil Penelitian.....	45
	4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Nias.....	45
	4.1.2. Keadaan Alam dan Penduduk Kabupaten Nias.....	49
	4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Nias	50
	4.1.4. Struktur Organisasi.....	52
	4.1.5. Analisis Data	53
	4.2. Pembahasan	66
	4.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	66
	4.2.2. Derajat Kontribusi BUMD	69
	4.2.3. Rasio Keserasian	72
	4.2.4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan	75
	4.2.5. Rasio Ketergantungan	77
	4.2.6. Derajat Desentralisasi.....	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
	5.1. Kesimpulan.....	84
	5.2. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Nias.....	2
Tabel 1.2. Tabulasi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019	5
Tabel 2.1. Kriteria Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan.....	21
Tabel 2.2. Kriteria Rasio Ketergantungan.....	26
Tabel 2.3. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi	27
Tabel 2.4. Mapping Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian	33
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 3.3. Kriteria Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan.....	39
Tabel 3.4. Kriteria Rasio Ketergantungan	43
Tabel 3.5. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi	44
Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	54
Tabel 4.2. Perhitungan Rasio Derajat Kontribusi BUMD	55
Tabel 4.3. Perhitungan Rasio Belanja Operasi.....	58
Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Belanja Modal.....	59
Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan	61
Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	63
Tabel 4.7. Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Nias	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini melakukan pergantian perubahan dari era persaingan global menuju persaingan informasi. Persaingan ini memungkinkan negara untuk terus berbenah menuju keberhasilan yang lebih maksimal. Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Agenda reformasi yang dilaksanakan pemerintah adalah reformasi manajemen keuangan sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap suatu nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara pengelolaan keuangan daerahnya.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah merupakan pihak yang diberi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dengan berlakunya otonomi daerah seharusnya pemerintah daerah lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah menyelenggarakan dan melaksanakan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Nias merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sembilan Kecamatan. Bupati Nias merupakan kepala pemerintahan dalam menjalankan kinerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD). Menurut situs web resmi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias selama lima tahun (2015-2019) berturut-turut memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) atau belum sepenuhnya optimal. Pemberian opini WDP tersebut disebabkan pada laporan keuangannya terdapat kesalahan penyajian material yang meliputi angka-angka dan pengungkapan atas kecurangan ataupun kesalahan lainnya serta ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 1.1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Nias

Tahun	Opini Audit
2015	WDP
2016	WDP
2017	WDP
2018	WDP
2019	WDP

Sumber : www.bpk.go.id

Berikut merupakan beberapa penemuan BPK atas opini WDP terhadap laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias tahun 2015-2019:

- a. Tahun 2015 saldo aset tetap sebesar Rp.51.388.227.193.000 tidak diyakini kewajaran nilainya serta tidak dapat dirinci, akibatnya BPK tidak dapat menentukan apakah perlu penyesuaian terhadap angka tersebut.
- b. Tahun 2016 penyajian belanja modal gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan (JIJ), terdapat kesalahan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.131.442.761,76, akibatnya hal tersebut berdampak pada

kurang andalnya penyajian belanja modal pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

- c. Tahun 2017 penyajian belanja modal gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan (JIJ), terdapat kesalahan kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.037.918.125,32, akibatnya hal tersebut berdampak pada kurang andalnya penyajian belanja modal pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- d. Tahun 2018 penyajian aset lain-lain sebesar Rp.24.724.653.414,00, dicatat secara gabungan atau tidak didukung rincian per unit aset, akibatnya BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.
- e. Tahun 2019 terdapat kesalahan penyajian aset tetap tanah serta gedung bangunan masing-masing sebesar Rp.141.078.337.788,00 dan Rp69.821.342.022,00, dimana aset tersebut sudah dipindahtangankan kepemilikannya, akibatnya salah saji aset tetap tersebut tidak dapat dikoreksi.

Perlu untuk diketahui peran utama auditor pemerintah adalah melakukan pengujian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah mengenai kewajaran laporan dan tingkat kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2019) pelaksanaan fungsi atestasi yang berupa pendapat atau opini auditor dibagi dalam lima bentuk, yaitu:

- a. Pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” merupakan pendapat yang paling tinggi dimana laporan keuangan disajikan secara wajar untuk semua pos

(akun) yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji yang material serta tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi atau prinsip akuntansi.

- b. Pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas” merupakan pendapat masih dalam kategori wajar tanpa pengecualian dimana untuk pos (akun) tertentu perlu penyesuaian agar menjadi wajar.
- c. Pendapat “Wajar Dengan Pengecualian” merupakan pendapat yang menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi, namun untuk pos tertentu disajikan tidak wajar.
- d. Pendapat “Tidak Wajar” atau *Adverse Opinion* merupakan pendapat yang diberikan apabila pos-pos yang disajikan nyata-nyata terdapat salah saji material dan tidak sesuai dengan standar akuntansi dimana terjadi karena buruknya kualitas pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada.
- e. “Tidak memberikan pendapat” atau *Disclaimer Opinion* merupakan auditor tidak memberikan pendapat karena beberapa faktor, misalnya auditor terganggu independensinya atau dibatasi mengakses data tertentu.

Belum diperolehnya opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK (badan pemeriksa keuangan) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya. Hasil opini yang telah diberikan oleh pihak pelaksana tugas sangat berkaitan dengan kinerja keuangan suatu daerah. Pemberian opini yang sama berturut-turut mengisyaratkan bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah pada periode lima tahun tersebut. Salah satu cara

untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan menganalisis rasio keuangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut ini dapat diketahui perhitungan Rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019.

Tabel 1.2. Tabulasi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan pendapatan (%)	Rasio Kemandirian (%)	Derajat Kontribusi BUMD (%)	Derajat Desentralisasi (%)	Rasio Ketergantungan (%)	Rasio Belanja Modal (%)	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	25,35	13,48	13,48	10,25	76,09	29,13	64,01
2016	15,57	13,55	11,46	10,12	74,69	28,56	55,26
2017	6,01	15,96	11,26	10,99	68,83	27,15	52,79
2018	3,43	14,50	13,16	9,84	67,83	22,95	56,88
2019	6,49	17,31	9,33	11,15	64,43	19,74	57,48

Sumber: BPS SUMUT (data diolah) 2020

Berdasarkan pada tabel 2.1. di atas dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2019. Begitu juga dengan rasio kemandirian yang rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan. Untuk derajat kontribusi BUMD mengalami fluktuasi dengan kontribusi yang sangat minim. Pada derajat desentralisasi terlihat berada di kriteria kurang bahkan tahun 2019 sangat kurang, ini artinya pemerintah daerah masih belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal. Untuk rasio ketergantungan pemerintah daerah berada di atas 50% yang artinya ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat maupun provinsi. Pada rasio belanja modal dan belanja operasi berada diluar angka yang diharapkan. Untuk rasio modal seharusnya berada di angka 5-20%, angka tersebut hanya terdapat di tahun 2019 sebesar 19,74%. Untuk belanja operasi seharusnya di angka 60-90%, angka tersebut terdapat di tahun 2015 sebesar 64,01%.

Penelitian kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio keuangan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Lazyra KS (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintahan kota Medan mengalami penurunan. Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dibawah standar keuangan daerah. Namun Rasio Efisiensi serta Realisasi Belanja berada di atas standar keuangan daerah. Selain dari rasio keuangan di atas, maka dapat menggunakan rasio keuangan tambahan, misalnya Derajat Desentralisasi, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Mahmudi, 2019).

Dengan data yang diuraikan maka penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya wajib dilakukan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019”**.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan tiap tahunnya, sehingga daerah belum mampu mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Rasio kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dalam kegiatan pemerintahan.

- c. Kurangnya kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah termasuk kontribusi BUMD yang rendah.
- d. Derajat desentralisasi berada di kriteria kurang bahkan sangat kurang, artinya pemerintah daerah masih kurang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan.
- e. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi sehingga masih belum mampu dalam mengelola daerah otonomnya sendiri.
- f. Dalam rasio belanja modal dan rasio belanja operasi, pemerintah daerah masih belum mendominasi proporsi belanja yang baik.

1.2.2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Pengukuran Kinerja Keuangan yang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah.

1.3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
- b. Bagaimana Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari Derajat Kontribusi BUMD Keuangan Daerah?
- c. Bagaimana Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari Rasio Keserasian Keuangan Daerah?

- d. Bagaimana Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah?
- e. Bagaimana Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah?
- f. Bagaimana Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
- b. Untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari derajat kontribusi BUMD keuangan daerah.
- c. Untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari rasio keserasian keuangan daerah.
- d. Untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari rasio pertumbuhan keuangan daerah.
- e. Untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah.
- f. Untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias jika dilihat dari derajat desentralisasi keuangan daerah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

- a. Dalam aspek keilmuan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam hal sistem akuntansi publik terutama dalam hal pengukuran kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio keuangan daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan pengelolaan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang ada keterkaitan dengan penelitian.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lazyra KS (2016) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Rasio Keuangan daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019”. Perbedaan penelitiannya terletak pada:

- a. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu rasio keuangan daerah dan 1 (satu) variabel terikat yaitu kinerja Keuangan. Hal yang membedakannya terletak pada indikator variabel, dimana penelitian sebelumnya menggunakan 4 (empat) rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Pada Penelitian ini menggunakan 6 (enam) rasio Keuangan Daerah diantaranya : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Kontribusi

BUMD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi.

- b. Waktu penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2021.
- c. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu di Pemerintah Kota Medan sedangkan penelitian ini di Pemerintah Kabupaten Nias.
- d. Data Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2011-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori tentang hubungan antara dua pihak yang melakukan kesepakatan antara pihak yang memberi kewenangan (prinsipal) dengan pihak yang diberi kewenangan. Teori keagenan lebih populer dalam konteks manajemen perusahaan yang berarah bisnis. Supriyono (2018) mengemukakan bahwa teori agensi (Keagenan) merupakan suatu teori yang didasarkan atas berperilaku yang berfikir untuk menjelaskan hubungan antara pemberi kontrak (prinsipal) dengan penerima kontrak (agen), dimana pihak prinsipal untuk bekerja dengan tujuan yang dicita-citakan sehingga agen diberi kekuasaan dalam mengambil suatu keputusan. Dalam teori keagenan juga dijelaskan adanya hubungan pemerataan dalam pembagian laba sehingga antara agen dan prinsipal memiliki perbedaan kepentingan didalamnya.

Teori keagenan dapat juga diterapkan pada sektor publik dimana dalam negara demokrasi memiliki hubungan keagenan antara pemerintah dengan masyarakat atau relasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki suatu keharusan dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawabnya kepada pemerintah pusat yang memberi wewenang. Hubungan tersebut juga dapat ditemukan dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah menyusun anggaran guna menyerahkan ke pusat untuk dimintai pengesahan yang setelahnya pemerintah daerah dapat

menggunakannya untuk menjalankan kegiatan. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran tersebut terhadap pemerintah pusat.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai pengelola pemerintahan (agen) dengan pihak publik yang memberi wewenang (prinsipal) dimana pengelola pemerintah harus memberikan dan menerapkan strategi dalam mewujudkan pelayanan kualitas terbaik terhadap masyarakat. Pihak publik pastinya menginginkan kepuasan atas hasil kinerja dari pengelolaan pemerintah. Kepuasan akan hasil kinerja yang baik tersebut dapat dilihat dari salah satunya laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka akan berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah.

2.1.2. Teori Kinerja

Kinetika energi kerja merupakan kepanjangan dari kinerja, serta disebut sebagai *performance* dalam bahasa Inggris. Jika di Indonesiakan istilah *performance* sering disebut sebagai *performa*. Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kinerja didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja (mengenai peralatan). Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan tolak ukur dari keberhasilan atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja adalah ukuran kemampuan dalam mencapai rancangan yang telah ditetapkan dari suatu hasil kerja, baik secara kuantitas atau kualitas terhadap tanggung jawab yang telah diberikan.

Menurut Moehariono (2012) kinerja merupakan gambaran ukuran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mencapai

tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Afandi (2018) “kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan otoritas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara sah serta tidak melanggar hukum maupun tidak bertentangan dengan moral dan etika”.

Berdasarkan paparan di atas kinerja dapat disimpulkan sebagai sebuah pencapaian atas prestasi kerja terhadap hasil kerja yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks kinerja keuangan daerah mengandung makna hasil kerja, kemampuan atau prestasi, kelayakan, maupun kepuasan masyarakat dalam rancangan yang telah dicapai. Penilaian kinerja sangat diperlukan dalam pemerintah daerah karena sangat penting dalam keberhasilan atau kegagalan yang berkaitan dengan pelaporan realisasi pendapatan maupun belanja.

2.1.3. Teori Kinerja Keuangan Daerah

Segala bentuk hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan roda pemerintahan daerah yang dapat diketahui dalam bentuk uang termasuk serta segala wujud kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah bersangkutan disebut keuangan daerah. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 keuangan daerah didefinisikan segala kewajiban dan hak daerah yang dapat menampung uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan pada perwujudan kewajiban maupun hak.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan dalam suatu daerah untuk mengelola serta menggali yang menjadi sumber-sumber

keuangan asli daerah dalam mencapai terpenuhi kebutuhan untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerahnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yaitu prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam ukuran waktu tertentu.

Salah satu cara yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dalam satu periode dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya sehingga menampilkan kecenderungan yang terjadi. Hasil analisis yang berkaitan dengan keuangan daerah memiliki manfaat penting bagi berbagai pemangku kepentingan.

Kebutuhan informasi keuangan daerah merupakan kebutuhan semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan daerah. Siapa saja pemangku kepentingan pemerintah daerah? Pemangku kepentingan daerah antara lain:

- a. Masyarakat pembayar pajak daerah
- b. Pemberi dana bantuan (donor)
- c. Masyarakat pemilih
- d. DPRD
- e. Investor
- f. Manajemen
- g. Pemerintah pusat
- h. Pemerintah daerah lain
- i. Badan pengawas dan advokasi

- j. Lembaga-lembaga internasional
- k. Karyawan/pegawai pemerintah daerah
- l. Penyedia barang dan jasa (pelaku bisnis di daerah)
- m. Lembaga rating (*rating agencies*), analisis ekonomi dan keuangan daerah
- n. Masyarakat pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang menitikberatkan pada sasaran dan tujuan program komponen kerja. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang diperoleh dari serangkaian aktivitas kegiatan atau program-program yang berhubungan dengan anggaran daerah yang mampu digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah. Kemampuan daerah dapat diukur dalam menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Manfaat serta tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah suatu pencapaian prestasi dalam pelaksanaan program bisa diukur dengan dorongan dalam pencapaian prestasi tersebut.

Adapun tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Mardiasmo (2012) yaitu:

- a. Membenahi kinerja pemerintah daerah.
- b. Mewujudkan pertanggungjawaban publik serta membenahi hubungan kelembagaan.
- c. Membantu dalam alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan.

Istilah kata kinerja sering digunakan dalam menyebut tingkat keberhasilan/prestasi perseorangan maupun kelompok yang disesuaikan dengan ukuran kriteria yang ditetapkan. Kriteria tersebut pastinya mempunyai tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah menurut Mahmudi (2019) yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan daerah.

2.1.4. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip bernegara (Undang-Undang No 23 pasal 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sedangkan menurut Widarta (2010) otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk daerah secara seimbang dengan pembagian, pengaturan, pemanfaatan, dan perimbangan yang dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran masyarakat, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pengendalian pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kedaulatan daerah otonom. Pemerintah daerah merujuk pada yurisdiksi tata laksana dalam suatu wilayah yang lebih kecil dari sebuah negara. Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi-bagi dalam provinsi yang dibagi lagi dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten maupun kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pengendalian pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kedaulatan daerah otonom. Pemerintah daerah merujuk pada yurisdiksi tata laksana dalam suatu wilayah yang lebih kecil dari sebuah negara. Negara

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi-bagi dalam provinsi yang dibagi lagi dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten dan kota sudah diatur wilayahnya dalam undang-undang

Adapun tujuan penting pemberian otonomi kepada suatu daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah memang urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam melaksanakan perannya setiap pemerintah daerah juga memiliki urusan-urusan pemerintahannya masing-masing. Pembagian urusan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah telah diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2014 yang terdiri dari 3 urusan, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan mutlak pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara kabupaten atau kota, provinsi, dan pemerintah pusat.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kekuasaan pemerintah selaku kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren dibagi dalam menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah disebut urusan pemerintahan wajib. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi daerah. Urusan pemerintahan

wajib, harus dibagi lagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar yang termasuk dalam urusan wajib adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Sosial
- d. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- f. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pelayanan dasar yang tidak termasuk dalam urusan wajib adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja
- b. Pangan
- c. Pertahanan
- d. Perhubungan
- e. Lingkungan hidup
- f. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- g. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- j. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- k. Komunikasi dan informatika
- l. Kepemudaan dan olahraga

- m. Penanaman modal
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan

Sedangkan ketentuan mengenai pembagian urusan pilihan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang kelautan, kehutanan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- c. Bidang energi dan sumber daya mineral yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi otoritas pemerintah pusat..
- d. Bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

2.1.5. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan adalah perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan maupun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dimaksudkan untuk alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerjanya. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, sehingga angka yang diperbandingkan berupa angka-angka dalam satu periode atau lebih (Faud, 2016).

Analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari komponen laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan menyamakannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2019).

Tingkat kinerja serta kemampuan keuangan pemerintah daerah menjadi faktor yang ingin diukur dalam penelitian ini. Pengukuran yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan hasil dalam upaya perbaikan yang berkelanjutan pada masa yang akan datang. Salah satu alat dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun jenis-jenis pengukuran rasio keuangan daerah menurut Mahmudi (2019) adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Ketergantungan dan Derajat Desentralisasi. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian memiliki arti mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan pihak luar serta mampu bertanggung jawab. Rasio kemandirian Keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai daerah sendiri dalam kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dalam daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan total pendapatan asli daerah (PAD) dibagi jumlah

penerimaan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun yang menjadi kriteria dalam mengukur rasio kemandirian beserta pola hubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1. Kriteria Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola Hubungan
Tinggi	> 75-100	Delegatif
Sedang	> 50-75	Partisipatif
Rendah	> 25-50	Konsultatif
Rendah sekali	0-25	Instruktif

Sumber: Rezki Anisa, (dalam Abdul Halim, 2013)

- 1) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sangat minim bahkan sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu serta mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 2) Pola hubungan partisipatif, campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan konsultatif, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah sudah dianggap sedikit lebih mampu.

- 4) Pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan mengambil bagian daripada kemandirian pemerintah daerah. Daerah ini dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

b. Derajat Kontribusi BUMD

Derajat kontribusi BUMD merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengetahui tingkat partisipasi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah (Mahmudi 2019). Derajat kontribusi yang diharapkan adalah rasio yang terus meningkat setiap tahunnya dalam mendukung pendapatan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pendapatan berbentuk hasil perusahaan kepunyaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba PDAM (perusahaan daerah air minum), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, laba perusahaan kepunyaan daerah lainnya, serta bagian laba dari penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga.

c. Rasio Keserasian

Menurut Mahmudi (2019) “Analisis keselarasan belanja berguna untuk melihat keseimbangan antar belanja. Hal ini berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik, pemerintah daerah perlu

melakukan harmonisasi belanja”. Rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal yang dibandingkan terhadap total belanja modal.

Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya habis digunakan dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja ini bersifat rutin, berulang serta dalam jangka pendek. Bagian belanja operasi menempati 60-90% dalam total belanja daerah. Yang termasuk dalam belanja operasi adalah:

- 1) Belanja pegawai merupakan belanja pengeluaran untuk belanja kompensasi berbentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pihak pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Juga pengeluaran untuk upah/honorarium, lembur dan pengeluaran lain dalam meningkatkan dorongan dan mutu pegawai dalam menunaikan program dan aktivitas pemerintah daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian dan perolehan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan penggunaan jasa dalam menunaikan program dan aktivitas daerah.
- 3) Belanja bunga merupakan belanja pengeluaran yang difungsikan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban berdasarkan perjanjian jangka pendek, menengah dan panjang.

- 4) Belanja subsidi merupakan pengeluaran yang telah diperhitungkan dan difungsikan untuk bantuan biaya produksi pada organisasi kelembagaan atau perusahaan tertentu.
- 5) Belanja hibah merupakan belanja yang telah dihitung untuk diberikan kepada pihak lain dalam bentuk uang bantuan, barang atau jasa.
- 6) Belanja bantuan sosial merupakan belanja pengeluaran yang telah ditafsirkan untuk memberikan bantuan pada lembaga masyarakat, partai politik dan lainnya bermaksud untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Rasio belanja operasi terhadap total belanja menginformasikan kepada pihak pemangku kepentingan mengenai ukuran belanja daerah yang dikhususkan untuk belanja operasi. Analisis belanja operasi diukur dengan membandingkan realisasi belanja operasi terhadap total belanja daerah.

Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran untuk membentuk dana cadangan yang berfungsi mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak diperoleh sekaligus dengan sepenuhnya untuk dibebankan dalam satu tahun anggaran. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.

Rasio belanja modal terhadap total belanja menginformasikan kepada pihak pemangku kepentingan tentang ukuran belanja yang dikhususkan pada investasi dalam bentuk belanja modal di tahun yang

bersangkutan. Analisis belanja modal dapat diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Pada umumnya bagian belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 %.

d. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan rasio ini maka dapat mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang kurang dan masih belum memperoleh perhatian. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan daerah dalam memperoleh nilai positif atau negatif selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2019).

Pertumbuhan pendapatan yang diharapkan adalah pertumbuhan positif yang kecenderungannya terus meningkat. Namun pertumbuhan dengan hasil negatif menunjukkan menurunnya kinerja pendapatan yang harus dicari penyebab penurunannya. Penyebabnya bisa terjadi karena faktor ekonomi makro diluar kendali pemerintah atau pengelolaan keuangan yang kurang baik.

e. Rasio Ketergantungan

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi mengharapkan bantuan dari sumber lain, sehingga organisasi tersebut tidak dapat menanggung tanggung jawabnya sendiri. Dalam hal ketergantungan organisasi pemerintahan dapat ditemukan pada

pemerintah daerah yang mengharapkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun dana yang diperoleh dari pemerintah pusat/provinsi adalah dana perimbangan, dana transfer pemerintah provinsi dan dana transfer lainnya.

Membandingkan antara penerimaan transfer yang diperoleh pemerintah daerah terhadap total pendapatan daerah merupakan cara menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah. Adapun yang menjadi kriteria dalam mengukur rasio ketergantungan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Kriteria Rasio Ketergantungan

Kriteria	Ketergantungan (%)
Sangat tinggi	>50,00
Tinggi	40,01-50,00
Cukup	30,01-40,00
Sedang	20,01-30,00
Rendah	10,01-20,00
Sangat rendah	0,00-10,00

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Samalua Waoma, 2018)

Dana yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat maupun provinsi suatu kewajaran jika dana penerimaan lebih kecil dari total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Yang diharapkan adalah dengan rasio yang rendah atau berangsur-angsur menurun. Rasio rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ketergantungan yang minim terhadap dana transfer.

f. Derajat Desentralisasi

Desentralisasi adalah suatu sistem penyerahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah banyak. Dalam sebuah organisasi, keuangan merupakan salah satu penggerak segala aktivitas dalam menunjang berjalannya organisasi, sehingga diperlukanlah rasio derajat desentralisasi fiskal. Penilaian akan derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Mahmudi (2019) derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi hasil yang didapatkan dari kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Adapun yang menjadi kriteria dalam mengukur derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Kriteria	Derajat Desentralisasi (%)
Sangat baik	> 50,00
Baik	40,01-50,00
Cukup	30,01-40,00
Sedang	20,01-30,00
Kurang	10,01-20,00
Sangat kurang	0,00-10,00

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991
(dalam Samalua Waoma, 2018)

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Puput Risky Paramita (2015)	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2013	Variabel X: 1. Rasio Efektivitas PAD 2. Rasio Efisiensi Keuangan daerah 3. Rasio Keserasian 4. Rasio Pertumbuhan 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Deskripsi Kuantitatif	1. Kinerja Keuangan daerah jika dilihat dari rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif 2. Jika dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien 3. Dari rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modal 4. Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara Efektif 5. Keuangan daerah masih tergolong sangat rendah dengan kategori pola hubungan Instruktif jika dilihat dari rasio Kemandirian Daerah
2	Lazyra Ks (2016)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	Variabel X: 1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Efisiensi 4. Rasio Belanja Modal 5. Rasio Pertumbuhan Variabel Y: 1. Kinerja Keuangan Daerah	Deskriptif Kuantitatif	1. Secara umum rasio kinerja keuangan mengalami penurunan. Kemandirian daerah masih dibawah standar. 2. Rasio efektivitas juga masih dibawah standar karena tidak mampu mencapai target pendapatan daerah 3. Rasio Efisiensi berada di atas standar keuangan karena besarnya belanja melebihi target. 4. Belanja modal cukup baik 5. Untuk tingkat rasio pertumbuhan

					pendapatan mengalami penurunan dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan daerah yang diterima.
3	Juliani Dora (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat Desentralisasi 2. Rasio Ketergantungan 3. Rasio Kemandirian 4. Rasio Efektivitas pajak 5. Rasio Efisiensi Pajak 6. Rasio Keserasian 7. Rasio Efisiensi Belanja 8. Rasio Pertumbuhan Pendapatan <p>Variabel Y:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Daerah 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat Desentralisasi menunjukkan hasil yang rendah 2. Memiliki tingkat rasio Ketergantungan yang tinggi 3. Hasil yang masih rendah dan memiliki hubungan konsultatif yang dikategorikan pada rasio Kemandirian 4. Rasio Efektivitas Pajak sangat efektif 5. Rasio efisiensi Pajak sangat efisien 6. Rasio keserasian didominasi oleh belanja operasi 7. Rasio efisiensi belanja menunjukkan telah terlaksananya penghematan anggaran 8. Rasio Pertumbuhan Pendapatan, PAD dan Rasio Pertumbuhan Belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif
4	Samalua Waoma (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Dalam Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 3. Rasio Desentralisasi Fiskal 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirian sangat baik 2. Rasio Ketergantungan Keuangan daerah terhadap dana pusat mengalami penurunan 3. Tingkat Desentralisasi berfluktuasi 4. Rasio Efektivitas mengalami Fluktuasi 5. Rasio Aktivitas dinilai tidak menentu sangat

			4. Rasio Efektivitas 5. Rasio Aktivitas 6. Rasio Pertumbuhan Variabel Y: 1. Otonomi Daerah		bervariasi tiap tahunnya. 6. Untuk Pertumbuhan PAD, Pendapatan, Belanja Rutin, Dan Belanja Pembangunan masih sangat rendah.
5	Meliana Br Ginting (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah kota Medan	Variabel X: 1. Desentralisasi Fiskal 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3. Rasio Efektivitas PAD 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 5. Rasio Pertumbuhan 6. Rasio keserasian Variabel Y: 1. Kinerja Keuangan Daerah	Deskriptif Kuantitatif	1. Tingkat Desentralisasi dikategorikan cukup baik 2. Untuk Rasio Kemandirian memiliki hubungan Konsultatif dan Partisipatif dimana tingkat ketergantungan mulai berkurang 3. Rasio Efektivitas mendapatkan kriteria tidak efektif 4. Rasio Efisiensi masih kategori tidak Efisien 5. Dalam rasio Pertumbuhan ditemukan tidak optimal 6. Sedangkan rasio Keserasian membuahkan hasil belanja Operasi lebih besar dibandingkan belanja Modal

2.3. Kerangka Konseptual

Menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Nias adalah proses pengukuran kemajuan keuangan atas pencapaian terhadap wewenang kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Analisis ini didasarkan pada data laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias. Suatu organisasi

sektor publik memerlukan adanya laporan Realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai bahan evaluasi dari tahun-tahun yang telah lewat serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kedepannya.

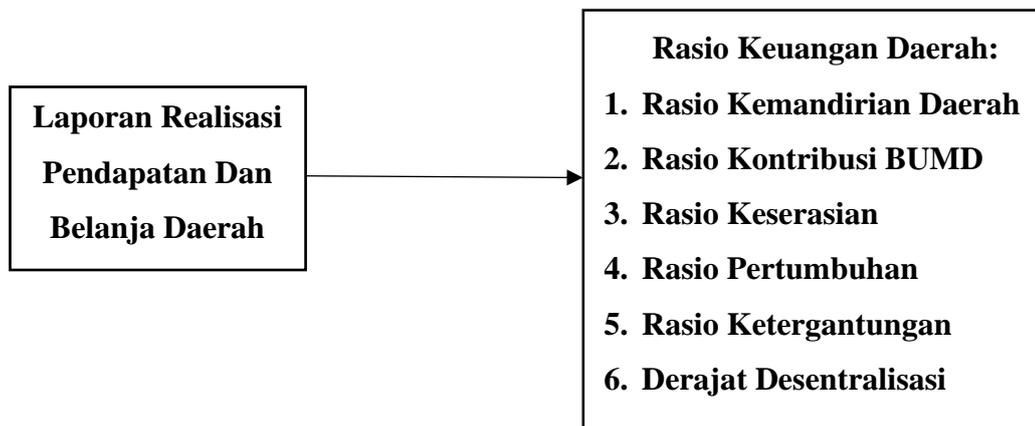
Dengan situasi dari masalah yang telah muncul maka pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Nias dapat dilakukan dengan beberapa rasio baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Di bawah ini ada beberapa rasio yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan yaitu:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah atas pihak luar. Rasio yang diinginkan dengan hasil kemandirian yang tinggi.
- b. Derajat Kontribusi BUMD menggambarkan tingkat pendapatan daerah dari dukungan perusahaan daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kontribusi BUMD yang tinggi merupakan rasio yang diinginkan karena mampu mendukung keuangan daerah lebih maksimal.
- c. Rasio Keserasian menganalisis belanja operasi dan belanja modal terhadap belanja. Rasio belanja operasi memberikan informasi kepada pihak luar mengenai porsi belanja operasi yang bersifat jangka pendek. Sedangkan belanja modal memberikan informasi porsi belanja daerah yang berbentuk tata letak investasi dalam belanja modal yang bersifat manfaat jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan belanja yang terus meningkat merupakan rasio kewajaran yang diharapkan.
- d. Rasio Pertumbuhan memberikan informasi tentang besaran pertumbuhan pendapatan dalam tahun anggaran bersangkutan. Hasil yang diharapkan adalah pertumbuhan positif yang terus meningkat.

- e. Rasio Ketergantungan memberikan informasi ukuran ketergantungan suatu daerah akan jumlah pendapatan transfer. Kriteria hasil yang baik adalah ketergantungan yang turun terus menerus yang berarti mampu suatu daerah dalam mengelola daerah pemerintahannya.
- f. Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah memberikan informasi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat yang semakin tinggi mengisyaratkan desentralisasi yang baik.

Dengan menggunakan rasio diatas dapat memberikan hasil Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias dalam periode tahun bersangkutan. Kinerja yang baik mampu menunjukkan hasil angka rasio yang memenuhi target.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan objek dan hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang sifatnya menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan keadaan yang terjadi. Sedangkan menurut Sugiyono (2015) suatu penelitian yang mengetahui nilai variabel independen, dengan satu atau lebih variabel (Independen) tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain disebut penelitian deskriptif.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Nias dengan mengambil data di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2021 sampai Juni 2021. Jadwal proses penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian

No	Aktivitas	Bulan																										
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus												
1	Pengajuan judul																											
2	Penulisan proposal																											
3	Seminar proposal																											
4	Perbaikan/ACC proposal																											
5	Pengelolaan data																											
6	Penulisan skripsi																											
7	Bimbingan skripsi																											
8	Sidang meja hijau																											

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019. Adapun sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari organisasi atau lembaga yang berupa data dokumentasi, bukti yang telah ada maupun data arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak publikasi. Sumber data yang digunakan berupa data Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara khususnya data tentang Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan suatu petunjuk untuk ketentuan suatu variabel yang diukur secara fungsional di lapangan. Variabel yang dijabarkan timbul dari penelitian yang dimasukkan ke dalam indikator-indikator secara rinci. Berikut definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Rasio Kemandirian	$= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	Rasio kemandirian Keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai daerah sendiri dalam kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dalam	Rasio

		<p>daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah bisa dihitung dengan membandingkan total penerimaan yang diterima daerah dibagi jumlah penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.</p> <p>Semakin tinggi rasionya maka kemandirian keuangan daerah semakin tinggi.</p> <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	
Derajat Kontribusi BUMD	$= \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$ <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	<p>derajat kontribusi BUMD berguna untuk mengetahui tingkat partisipasi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Derajat Kontribusi BUMD menggambarkan tingkat pendapatan daerah dari dukungan perusahaan daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kontribusi BUMD yang tinggi merupakan rasio yang diinginkan karena mampu mendukung keuangan daerah dengan lebih maksimal.</p> <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	Rasio
Rasio Keserasian	<p>Belanja Operasi</p> $= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ <p>Belanja Modal</p> $= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	<p>Rasio Keserasian menganalisis belanja operasi dan belanja modal terhadap belanja. Rasio belanja operasi memberikan informasi kepada pihak luar mengenai porsi belanja operasi yang bersifat jangka pendek. Analisis belanja operasi diukur dengan membandingkan realisasi</p>	Rasio

	<p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	<p>belanja operasi terhadap total belanja daerah. Sedangkan belanja modal memberikan informasi porsi belanja daerah yang berbentuk tata letak investasi dalam belanja modal yang bersifat manfaat jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan belanja yang terus meningkat merupakan rasio kewajaran yang diharapkan. Analisis belanja modal dapat diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah.</p> <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	
<p>Rasio Pertumbuhan</p>	$= \frac{\text{Tahun } t - \text{Tahun}(t - 1)}{\text{Tahun}(t - 1)} \times 100\%$ <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	<p>Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun ke tahun berikutnya.</p> <p>Rasio pertumbuhan pendapatan berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam satu tahun atau beberapa periode mengalami pertumbuhan pendapatan positif atau negatif dalam kinerja anggarannya. Tentunya, pertumbuhan pendapatan diharapkan positif dan trennya meningkat.</p> <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	<p>Rasio</p>
<p>Rasio Ketergantungan</p>	$= \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$ <p><i>Sumber : Mahmudi (2019)</i></p>	<p>Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi mengharapkan bantuan dari sumber lain,</p>	<p>Rasio</p>

		<p>sehingga organisasi tersebut tidak dapat menanggung tanggung jawabnya sendiri. Rasio ketergantungan diperoleh dengan membandingkan total penerimaan transfer terhadap total penerimaan daerah. Semakin rendah rasio ini maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah pusat.</p> <p>Sumber : Mahmudi (2019)</p>	
<p>Derajat Desentralisasi</p>	$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$ <p>Sumber : Mahmudi (2019)</p>	<p>Desentralisasi adalah suatu sistem penyerahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam skala banyak. Membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah merupakan cara menghitung derajat desentralisasi. Semakin tinggi hasil yang didapatkan dari kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi</p> <p>Sumber : Mahmudi (2019)</p>	Rasio

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mendukung penelitian ini berbentuk teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan

dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang bersumber dari dokumen Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara khususnya data tentang Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019 yang diperlukan oleh peneliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu tahapan dalam memproses data menjadi informasi. Metode dalam analisis ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan dimana metode ini digunakan untuk merumuskan masalah yang dihadapi. Metode ini digunakan dengan menghitung data keuangan dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2015) Metode kuantitatif merupakan penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- a. Mengumpulkan data penelitian berbentuk Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019
- b. Mengukur dan menghitung rasio keuangan daerah berdasarkan skala.
- c. Membandingkan dan mengembangkan sesuai dengan literatur, teori-teori dan penelitian sebelumnya sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah.

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rasio.

Analisis rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu pemerintahan daerah dalam membiayai daerah sendiri

dalam kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperolehnya.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel. 3.3. Kriteria Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola Hubungan
Tinggi	> 75-100	Delegatif
Sedang	> 50-75	Partisipatif
Rendah	> 25-50	Konsultatif
Rendah sekali	0-25	Instruktif

Sumber: Rezki Anisa (dalam Abdul Halim, 2013)

Menurut Mahmudi (2019) semakin tinggi angka rasio keuangan yang diperoleh maka menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Pada penelitian sebelumnya Lazyra KS (2016) “penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio kemandirian bisa disebabkan karena meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga rasio kemandirian dapat dikatakan rendah”. Rasio yang rendah menggambarkan sumber dana eksternal yang masih tinggi serta belum mampunya daerah dalam mengoptimalkan PAD untuk membiayai daerah.

b. Derajat Kontribusi BUMD

Derajat Kontribusi BUMD merupakan rasio yang menunjukkan tingkat partisipasi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah (Mahmudi, 2019).

Perhitungan derajat kontribusi BUMD:

$$\text{Derajat Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Derajat kontribusi BUMD memberikan gambaran akan partisipasi suatu daerah. Dukungan tersebut diperoleh dalam hal penerimaan bagian laba dalam pendapatan daerah. Ukuran rasio kontribusi BUMD dilihat dari tingkat pertumbuhan kontribusi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang selalu meningkat yang disertai pertumbuhan yang positif menunjukkan daerah tersebut dalam hal pembagian laba memiliki kontribusi yang baik. Untuk hasil pertumbuhan yang negatif serta mengalami penurunan yang berangsur-angsur rendah maka perlu diungkapkan alasan akan perbaikan dalam memulihkan pendapatan dalam partisipasi suatu daerah.

c. Rasio Keserasian

Menurut Mahmudi (2019) “analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi”. Analisis keserasian berupa analisis belanja operasi dan analisis belanja modal terhadap total belanja.

Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya habis digunakan dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja ini bersifat rutin, berulang serta dalam jangka pendek. Perlu diketahui belum ada patokan belanja operasi terhadap total belanja daerah yang ideal, namun pada umumnya proporsi belanja operasi menempati 60-90% terhadap total belanja daerah. Di angka tersebut belanja operasi dapat dikatakan baik.

Perhitungan rasio belanja operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran untuk membentuk dana cadangan yang berfungsi mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak diperoleh sekaligus dengan sepenuhnya untuk dibebankan dalam satu tahun anggaran. Secara umumnya patokan belanja modal menempati 60-90% dalam total belanja daerah walaupun di angka tersebut bukan patokan yang pasti. Namun di angka tersebut belanja modal dapat dikategorikan baik.

Perhitungan rasio belanja modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Menurut Juliana Dora (2017) pada penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam rasio keserasian antara belanja operasi dan belanja modal wajib ada keseimbangan serta tidak ada pengalokasian yang berat sebelah. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa dalam mengukur rasio keserasian diperlukan penggunaan belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja sama-sama diutamakan sesuai dengan porsi kepentingannya masing-masing.

d. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan

keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun ke tahun berikutnya. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan daerah dalam memperoleh nilai positif atau negatif selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2019).

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan:

$$\text{Pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Pada penelitian sebelumnya menurut Lazyra KS (2016) salah satu yang menyebabkan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang signifikan bisa disebabkan karena kurang maksimalnya pendapatan yang diterima. Pertumbuhan pendapatan yang diharapkan adalah pertumbuhan positif yang kecenderungannya terus meningkat. Pertumbuhan yang positif dengan angka yang selalu meningkat merupakan rasio pertumbuhan dalam kategori baik. Sementara pertumbuhan dengan hasil negatif menunjukkan rasio pertumbuhan kategori tidak baik yang berefek menurunnya kinerja pendapatan.

e. Rasio Ketergantungan

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi mengharapkan bantuan dari sumber lain, sehingga organisasi tersebut tidak dapat menanggung tanggung jawabnya sendiri.

Perhitungan rasio ketergantungan:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 3.4. Kriteria Rasio Ketergantungan

Kriteria	Ketergantungan (%)
Sangat tinggi	>50,00
Tinggi	40,01-50,00
Cukup	30,01-40,00
Sedang	20,01-30,00
Rendah	10,01-20,00
Sangat rendah	0,00-10,00

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Samalua Waoma, 2018)

Semakin tinggi rasio maka semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Yang diharapkan adalah dengan rasio yang rendah atau berangsur-angsur menurun. Rasio rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ketergantungan yang minim terhadap dana transfer. Pada penelitian sebelumnya menurut Samalua Waoma (2018) tingkat ketergantungan akan suatu daerah dapat berkurang jika mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

f. Derajat Desentralisasi

Desentralisasi adalah suatu sistem penyerahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah banyak. Penilaian akan derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Perhitungan derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 3.5. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Kriteria	Derajat Desentralisasi (%)
Sangat baik	> 50,00
Baik	40,01-50,00
Cukup	30,01-40,00
Sedang	20,01-30,00
Kurang	10,01-20,00
Sangat kurang	0,00-10,00

*Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991
(dalam Samalua Waoma, 2018)*

Menurut Mahmudi (2019) derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi hasil yang didapatkan dari kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio lebih dari 50% merupakan rasio yang sangat baik. Pada penelitian sebelumnya menurut Juliani Dora (2017) tentang derajat desentralisasi yang rendah dapat diatasi dengan memperluas basis penerimaan. Artinya penerimaan daerah yang rendah mampu mempengaruhi tingkat derajat desentralisasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Nias

Kabupaten Nias merupakan bagian wilayah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang berada di Pulau Nias. Ibukota Kabupaten Nias terletak di Kecamatan Gido, yang bisa dilalui lewat jalur laut dari Sibolga dengan kapal laut atau pesawat dari Medan. Pulau Nias memiliki jarak \pm 85 mil laut dari Sibolga (wilayah Provinsi Sumatera Utara). Kabupaten Nias memiliki luas wilayah 1.004,06 km², dikelilingi oleh Samudera Hindia serta sejajar dan terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Nias berada pada garis 0°12'-032' Lintang Utara (LU) dan 97°-98' Bujur Timur (BT) yang berdekatan dengan ekuator.

Berdasarkan luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Nias, wilayah terluas adalah Kecamatan Idanogawo dengan luas wilayah 231,61 km atau sekitar 23,07 persen dari luas wilayah Kabupaten Nias, diikuti oleh Kabupaten Bawolato dengan luas 189,75 km atau sekitar 18,9 persen, kemudian Kecamatan Gido dengan luas 105,68 km atau sekitar 10,53 persen, sementara wilayah Kecamatan Somolomolo dengan luas 35,39 km merupakan wilayah terkecil atau sekitar 3,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Nias.

Dalam bahasa lokal Nias, Pulau Nias disebut sebagai Tanö Niha. Di Kabupaten Nias sebagian besar warga masih mengandalkan hasil pertanian. Potensi luas lahan mencapai 81.389 hektar, terdiri dari 22.486 hektar sawah dan 58.903 hektar lahan kering. Namun potensi tersebut belum memberikan hasil yang

maksimal untuk dapat mencapai swasembada pangan. Terbukti, pada 1999 kabupaten ini masih mendatangkan 22.323 ton beras dari luar daerah. Tidak jauh berbeda dengan keadaan hasil perkebunan. Area Nias yang subur sangat cocok untuk budidaya kelapa, nilam, karet, kopi dan cengkeh. Kopro dan karet menjadi andalan hasil perkebunan. Pada tahun 1999 produksi kopra 42.230 ton dan karet 13.624 ton.

Pada tahun 1956 Kabupaten Nias ditetapkan sebagai daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan undang-undang darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom di lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 November 1956 yang sekaligus menandai bahwa Kabupaten Nias pada tanggal tersebut resmi telah diakui dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Nias yang awalnya merupakan kabupaten tertua di wilayah Kepulauan Nias telah menghasilkan 4 (empat) DOB (daerah otonom baru) yaitu:

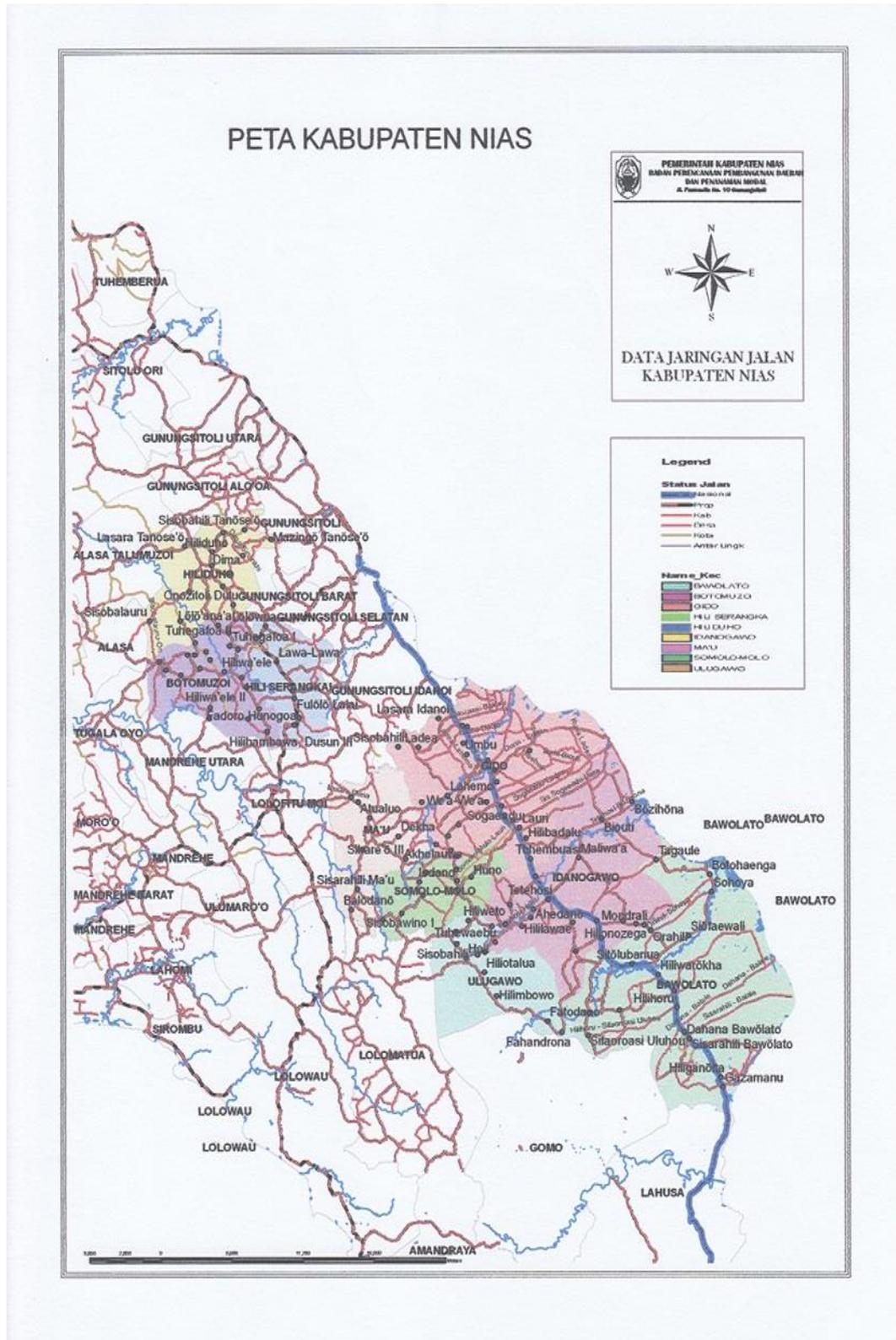
- a. Kabupaten Nias Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003.
- b. Kabupaten Nias Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008.
- c. Kabupaten Nias Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008.
- d. Kota Gunungsitoli yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil pemetaan SP (sensus penduduk) 2020, Kabupaten Nias memiliki 10 Kecamatan dengan 170 Desa dan 544 dusun/SLS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Idanogawo dengan 28 Desa/Kelurahan dan 79 Dusun/SLS
- b. Kecamatan Bawolato dengan 25 Desa/Kelurahan dan 100 Dusun/SLS
- c. Kecamatan Ulugawo dengan 14 Desa/Kelurahan dan 51 Dusun/SLS
- d. Kecamatan Gido dengan 21 Desa/Kelurahan dan 60 Dusun/SLS
- e. Kecamatan Sogaeadu dengan 11 Desa/Kelurahan dan 34 Dusun/SLS
- f. Kecamatan Ma'u dengan 11 Desa/Kelurahan dan 40 Dusun/SLS
- g. Kecamatan Somolo-molo dengan 11 Desa/Kelurahan dan 32 Dusun/SLS
- h. Kecamatan Hiliduho dengan 16 Desa/Kelurahan dan 53 Dusun/SLS
- i. Kecamatan Hiliserangkai dengan 38 Desa/Kelurahan dan 44 Dusun/SLS
- j. Kecamatan Botomuzoi dengan 18 Desa/Kelurahan dan 51 Dusun/SLS

Berdasarkan posisi geografis batas wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Nias berbatasan langsung dengan wilayah laut/perairan serta kabupaten lain. Batas-batas wilayahnya dapat dilihat dari rincian berikut:

- a. Sebelah utara: Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Utara
- b. Sebelah utara: Kabupaten Nias Selatan
- c. Sebelah timur: Kota Gunungsitoli dan Samudra Indonesia
- d. Sebelah barat : Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nias

Sumber: <https://niaskab.go.id>

4.1.2. Keadaan Alam dan Penduduk Kabupaten Nias

a. Keadaan Alam

Kondisi alam topografi daratan Kabupaten Nias sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan yang sempit dan terjal dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah, berbukit dan pegunungan. Dengan kondisi alam yang demikian menghasilkan 67 sungai kecil, sedang, atau besar yang terdapat di hampir semua kecamatan.

Letak Kabupaten Nias yang dekat garis khatulistiwa, menghasilkan curah hujan tahunan yang cukup tinggi. Kabupaten Nias sangat lembab dan basah dengan curah hujan yang tinggi rata-rata 23 hari per bulan. Selain itu, posisi Kabupaten Nias yang dikelilingi oleh Samudera Hindia sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim.

Kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun adalah 5,4 knot. Kondisi seperti ini selain curah hujan yang tinggi mengakibatkan sering terjadinya badai besar. Musim badai laut setiap tahun biasanya terjadi antara bulan September sampai November, namun terkadang juga terjadi pada bulan Agustus dan cuaca dapat berubah secara tiba-tiba. Sedangkan suhu udara rata-rata di Kabupaten Nias dapat mencapai 26,4 C dengan rata-rata maksimum 30,6 C dan minimum 23,3 C.

b. Keadaan Penduduk

Pada bulan September 2020, Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia menyelenggarakan kegiatan sensus penduduk ke tujuh. Dari sensus tersebut dilakukan juga oleh BPS Kabupaten Nias yang mencatat

jumlah penduduk Kabupaten Nias sebanyak 146.672 jiwa, penduduk laki-laki 71.686 orang dan wanita sebanyak 74.986 orang, dengan rasio sebanyak 95,60 yang artinya ada 95 laki-laki per 100 wanita.

Dari 10 kecamatan di Kabupaten Nias, Kecamatan Idanogawo mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 26.967 jiwa atau sekitar 18,39 persen, selanjutnya Kecamatan Bawolato 25.113 atau 17,12 persen dan kemudian Kecamatan Gido 23.326 atau 15,90 persen. Sedangkan jumlah populasi terkecil adalah Kecamatan Somolo-molo sebanyak 6.558 atau 4,47 persen.

Jika dilihat dari kelompok umur, populasi terbesar adalah grup Generasi Z (lahir 1997-2012) sebanyak 53.342 jiwa, lalu generasi Milenial (1981-1996) sebanyak 37.589 orang, Post Generasi Z (sesudah 2013) 21.435 dan Generasi X (1965-1980) 21.299 sisanya termasuk dalam kelompok Boomer (1946-1964) sebanyak 11.674 dan Pre Boomer (sebelum 1945) sebanyak 1.333 jiwa per km².

Kepadatan penduduk di tahun 2019 sebanyak 168 orang per km² persegi meningkat menjadi 172 orang per km² pada tahun 2020. Tingkat pertumbuhan populasi selama beberapa tahun dari 2010-2020 sebesar 0,75 persen.

4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Nias

a. Visi

"Terwujudnya Kabupaten Nias Yang Maju"

1. Maju: Kabupaten Nias mengalami perkembangan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik dalam berbagai dimensi dan aspek kehidupan

yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan unggul.

2. Mandiri: Kemampuan nyata masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerah berdasarkan prakarsa sendiri atas bahana masyarakat serta memiliki tingkat ketergantungan dengan pihak lain yang rendah.
3. Sejahtera: terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material dan fisiologis, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti kebersamaan, cinta kasih, ketenteraman dan rasa aman serta kebutuhan, dan harga untuk aktualisasi diri.

b. Misi

1. Membangun sarana fisik dan wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat.
3. Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi berkeadilan dan merata.
4. Menyelenggarakan birokrasi dan pemerintahan yang baik yang profesional dan melayani.
5. Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang taat hukum, religius, dan taat hukum

4.1.4. Struktur Organisasi

Adapun organisasi perangkat daerah pemerintahan kabupaten Nias secara garis besar terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah
- b. DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Pendidikan
- e. Dinas Kesehatan
- f. Dinas Sosial
- g. Dinas Perhubungan (DISHUB)
- h. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi (DISNAKERKOP)
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
- j. Dinas Pariwisata
- k. Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERUKIM)
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISTANHANPAN)
- n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- o. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KB)
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PERIZINAN)
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERPUSIP)
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah (DISDUKCAPIL)
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
- u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- v. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
- x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- y. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD)
- z. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

4.1.5. Analisis Data

Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah.

Data yang digunakan adalah data Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Dengan data ini nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian Keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai daerah sendiri dalam kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dalam daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi, serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio (%)	Pola Hubungan
-------	-----	---------------------	-----------	---------------

2015	70.892.624.000	525.798.998.000	13,48	Instruktif
2016	82.840.434.000	611.361.799.000	13,55	Instruktif
2017	95.726.168.000	599.493.519.000	15,96	Instruktif
2018	88.754.606.000	611.725.679.000	14,50	Instruktif
2019	107.629.139.000	621.468.917.000	17,31	Instruktif
Rata-rata			14,96	Instruktif

$$\text{Tahun 2015} = \frac{70.892.624.000}{525.798.998.000} \times 100\%$$

$$= 13,48\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{82.840.434.000}{611.361.799.000} \times 100\%$$

$$= 13,55\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{95.726.168.000}{599.493.519.000} \times 100\%$$

$$= 15,96\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{88.754.606.000}{611.725.679.000} \times 100\%$$

$$= 14,50\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{107.629.139.000}{621.468.917.000} \times 100\%$$

$$= 17,31\%$$

Berdasarkan tabel 4.1. di atas ditemukan bahwa perhitungan rasio kemandirian keuangan keuangan daerah selama lima tahun berturut-turut masih sangat rendah, dimana pada tahun-tahun tersebut perkembangan rasio kemandiriannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan ada satu tahun yang mengalami penurunan. Kemampuan keuangannya tergolong belum mandiri dengan pola hubungannya instruktif. Pola hubungan instruktif disebut peran pemerintah pusat lebih dominan mengambil bagian daripada kemandirian

pemerintah daerah sehingga daerah bersangkutan dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Nias sebesar 13,48%, tahun 2016 sebesar 13,55%, tahun 2017 sebesar 15,96%, tahun 2018 sebesar 14,50% dan tahun 2019 sebesar 17,31%. Angka rasio tertinggi berada tahun 2019, namun itu pun masih belum layak untuk dikatakan mandiri karena secara kriterianya tergolong masih rendah dengan rata-rata sebesar 14,96%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kemandirian daerah sangat rendah serta masih memiliki tingkat harapan dana yang besar terhadap dana transfer baik dari pusat, provinsi maupun daerah lainnya.

b. Derajat Kontribusi BUMD

Derajat kontribusi BUMD merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengetahui tingkat partisipasi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah (Mahmudi 2019). Derajat kontribusi yang diharapkan adalah rasio yang terus meningkat setiap tahunnya dalam mendukung pendapatan daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 4.2. Perhitungan Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Penerimaan Laba BUMD	PAD	Rasio (%)
2015	9.562.922.000	70.892.624.000	13,48
2016	9.501.203.000	82.840.434.000	11,46
2017	10.780.870.000	95.726.168.000	11,26

2018	11.688.733.000	88.754.606.000	13,16
2019	10.052.196.000	107.629.139.000	9,33
Rata-rata			11,73

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{9.562.922.000}{70.892.624.000} \times 100\% \\ &= 13,48\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{9.501.203.000}{82.840.434.000} \times 100\% \\ &= 11,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{10.780.870.000}{95.726.168.000} \times 100\% \\ &= 11,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{11.688.733.000}{88.754.606.000} \times 100\% \\ &= 13,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{10.052.196.000}{107.629.139.000} \times 100\% \\ &= 9,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.2. di atas rasio derajat kontribusi BUMD pada tahun 2015 sebesar 13,48%, tahun 2016 sebesar 11,46%, tahun 2017 sebesar 11,26%, tahun 2018 sebesar 13,16% dan tahun 2019 sebesar 9,33%. Selama lima tahun berturut-turut derajat kontribusi BUMD mengalami fluktuasi, angka tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 13,48% dan tahun 2018 sebesar 13,16% sementara untuk derajat terendah berada pada tahun 2019 sebesar 9,33%.

Pertumbuhan derajat kontribusi BUMD sudah cukup baik walaupun beberapa tahun mengalami penurunan masih dalam kategori

pertumbuhan yang positif. Namun seharusnya pertumbuhan yang positif diiringi dengan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil yang telah dinilai dengan pertumbuhan yang fluktuasi dan beberapa tahun mengalami penurunan maka dapat disimpulkan derajat kontribusi BUMD Kabupaten Nias mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata sebesar 11,73%.

c. Rasio Keserasian

Menurut Mahmudi (2019) untuk mengetahui keseimbangan antar belanja maka perlu yang namanya analisis keserasian belanja. Hal ini berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja agar fungsi anggaran dapat berjalan baik. Rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Bagian belanja operasi menempati harmonisasi 60-90% dalam total belanja daerah, sementara bagian belanja modal terhadap total belanja daerah memiliki harmonisasi antara 5-20%.

Perhitungan rasio belanja operasi dan belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 4.3. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio (%)
2015	426.965.327.000	666.992.376.000	64,01
2016	440.239.585.000	796.586.640.000	55,26
2017	465.687.010.000	881.983.873.000	52,79
2018	529.173.521.000	930.217.782.000	56,88
2019	560.671.453.000	975.280.101.000	57,48
Rata-rata			57,28

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{426.965.327.000}{666.992.376.000} \times 100\% \\ &= 64,01\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{440.239.585.000}{796.586.640.000} \times 100\% \\ &= 55,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{465.687.010.000}{881.983.873.000} \times 100\% \\ &= 52,79\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{529.173.521.000}{930.217.782.000} \times 100\% \\ &= 56,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{560.671.453.000}{975.280.101.000} \times 100\% \\ &= 57,48\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 57,28%. Pada tahun 2015 rasionya sebesar 64,01%, kemudian tahun 2016 menurun menjadi 55,26%, pada tahun 2017 menurun menjadi 52,79%, kemudian dua tahun berikutnya meningkat yaitu tahun 2018 sebesar 56,88% dan tahun 2019 sebesar 57,48%.

Berdasarkan penilaian tersebut porsi belanja operasi terhadap total belanja sudah dikatakan baik hampir mendekati rasio 60%, walaupun ukuran rasio terbaiknya di angka 60-90% bukan suatu patokan mutlak karena besaran rasio operasi dipengaruhi oleh kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan besaran realisasi pendapatannya.

Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio (%)
2015	194.330.739.000	666.992.376.000	29,13
2016	227.559.502.000	796.586.640.000	28,56
2017	239.523.861.000	881.983.873.000	27,15
2018	207.016.877.000	930.217.782.000	22,95
2019	190.454.027.000	975.280.101.000	19,74
Rata-rata			25,50

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{194.330.739.000}{666.992.376.000} \times 100\% \\ &= 29,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{227.559.502.000}{796.586.640.000} \times 100\% \\ &= 28,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{239.523.861.000}{881.983.873.000} \times 100\% \\ &= 27,15\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{207.016.877.000}{930.217.782.000} \times 100\% \\ &= 22,95\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{190.454.027.000}{975.280.101.000} \times 100\% \\ &= 19,74\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja sebesar 25,50%. Selama lima tahun berturut-turut rasio belanja modalnya selalu menurun. Pada tahun 2015 rasionya sebesar 29,13%, tahun 2016 menurun menjadi 28,56%, tahun 2017 menjadi 27,15%, kemudian tahun 2018 sebesar 22,95% dan tahun 2019 sebesar 19,74%.

Berdasarkan penilaian tersebut porsi belanja modal terhadap total belanja sudah dikatakan memburuk telah melewati rasio 20%, walaupun ukuran rasio terbaiknya di angka 5-20% bukan suatu patokan mutlak karena besaran rasio modal dipengaruhi oleh kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan besaran realisasi pendapatannya.

d. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan rasio ini maka dapat mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang kurang dan masih belum memperoleh perhatian. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan daerah dalam memperoleh nilai positif atau negatif selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2019).

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan:

$$\text{Pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 4.5. perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan

Tahun	Pendapatan	Rasio (%)
2014	515.836.195.000	-
2015	691.021.858.000	25,35
2016	818.455.989.000	15,57
2017	870.868.735.000	6,01
2018	901.833.538.000	3,43
2019	964.445.047.000	6,49
Rata-rata		11,37

$$\text{Tahun 2015} = \frac{691.021.858.000 - 515.836.195.000}{515.836.195.000} \times 100\%$$

$$= \frac{175.185.663.000}{515.836.195.000} \times 100\%$$

$$= 25,35\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{818.455.989.000 - 691.021.858.000}{691.021.858.000} \times 100$$

$$= \frac{127.434.131.000}{691.021.858.000} \times 100\%$$

$$= 15,57\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{870.868.735.000 - 818.455.989.000}{818.455.989.000} \times 100$$

$$= \frac{52.412.746}{818.455.989.000} \times 100\%$$

$$= 6,01\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{901.833.538.000 - 870.868.735.000}{870.868.735.000} \times 100\%$$

$$= \frac{30.964.803}{870.868.735.000} \times 100\%$$

$$= 3,43\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{964.445.047.000 - 901.833.538.000}{901.833.538.000} \times 100\%$$

$$= \frac{62.611.509}{901.833.538.000} \times 100\%$$

= 6,49%

Tabel 4.5. di atas menunjukkan rasio pertumbuhan pendapatan dari tahun 2015-2018 menurun signifikan, namun kembali naik pada tahun 2019. Pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 25,35%, tahun 2016 menurun menempati angka 15,57%, tahun 2017 kembali menurun menempati angka 6,01% serta yang paling rendah pada tahun 2018 sebesar 3,43%. Namun pada tahun 2019 kembali naik di angka 6,49%.

Pada tabel di atas juga selama lima tahun memperlihatkan pertumbuhan pendapatan sudah cukup baik walaupun selama tiga tahun mengalami penurunan masih dalam kategori pertumbuhan yang positif. Namun seharusnya pertumbuhan yang positif diiringi dengan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil yang telah dinilai dengan pertumbuhan yang menurun berakhir naik maka dapat disimpulkan rasio pertumbuhan pendapatan kabupaten Nias mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata sebesar 11,37%.

e. Rasio Ketergantungan

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi mengharapkan bantuan dari sumber lain, sehingga organisasi tersebut tidak dapat menanggung tanggung jawabnya sendiri. Dalam hal ketergantungan organisasi pemerintahan dapat ditemukan pada pemerintah daerah yang mengharapkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun dana yang diperoleh dari pemerintah pusat/provinsi adalah dana perimbangan, dana transfer

pemerintah provinsi dan dana transfer lainnya. Membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah merupakan cara yang dirumuskan untuk mencari besaran rasio ketergantungan keuangan daerah.

Perhitungan rasio ketergantungan:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2015	525.798.998.000	691.021.858.000	76,09	Sangat tinggi
2016	611.361.799.000	818.455.989.000	74,69	Sangat tinggi
2017	599.493.519.000	870.868.735.000	68,83	Sangat tinggi
2018	611.725.679.000	901.833.538.000	67,83	Sangat tinggi
2019	621.468.917.000	964.445.047.000	64,43	Sangat tinggi
Rata-rata			70,37	Sangat tinggi

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{525.798.998.000}{691.021.858.000} \times 100\% \\ &= 76,09\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{611.361.799.000}{818.455.989.000} \times 100\% \\ &= 74,69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{599.493.519.000}{870.868.735.000} \times 100\% \\ &= 68,83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{611.725.679.000}{901.833.538.000} \times 100\% \\ &= 67,83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{621.468.917.000}{964.445.047.000} \times 100\% \\ &= 64,43\% \end{aligned}$$

Tabel 4.6. di atas menunjukkan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebesar 76,09%, tahun 2016 sebesar 74,69%, tahun 2017 sebesar 68,83%, tahun 2018 sebesar 67,83% dan tahun 2019 sebesar 64,43%. Rasio yang terus menurun merupakan hal yang baik yang dapat diketahui berkurangnya tingkat ketergantungan keuangan daerah. Namun rasio tersebut masih menempati angka-angka ketergantungan yang sangat tinggi, dimana berada lebih dari 50% sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias masih sangat tinggi.

f. Derajat Desentralisasi

Desentralisasi adalah suatu sistem penyerahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah banyak. Penilaian akan derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2019) derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

Perhitungan derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Tabel 4.7. Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2015	70.892.624.000	691.021.858.000	10,25	Kurang
2016	82.840.434.000	818.455.989.000	10,12	Kurang
2017	95.726.168.000	870.868.735.000	10,99	Kurang
2018	88.754.606.000	901.833.538.000	9,84	Sangat kurang
2019	107.629.139.000	964.445.047.000	11,15	Kurang
Rata-rata			10,47	Kurang

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{70.892.624.000}{691.021.858.000} \times 100\% \\ &= 10,25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{82.840.434.000}{818.455.989.000} \times 100\% \\ &= 10,12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{95.726.168.000}{870.868.735.000} \times 100\% \\ &= 10,99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{88.754.606.000}{901.833.538.000} \times 100\% \\ &= 9,84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{107.629.139.000}{964.445.047.000} \times 100\% \\ &= 11,15\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7. di atas dapat dilihat bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Nias terkait desentralisasi fiskal dinilai kurang, seharusnya pemerintah daerah bersangkutan wajib merealisasikan kewenangan dari pusat dengan maksimal sesuai porsi daerah otonom sendiri. Dimulai pada tahun 2015 derajat desentralisasi fiskal pada pemerintahan Kabupaten Nias sebesar 10,25%, pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Tahun 2016

sebesar 10,12%, tahun 2017 sebesar 10,99%, tahun 2018 sebesar 9,84% dan tahun 2019 sebesar 11,15%.

Mengingat daerah bersangkutan tingkat tanggung jawabnya yang kurang maka hal ini menunjukkan kewenangan yang telah diberikan oleh pihak pusat sangat minim dalam pelaksanaannya termasuk dalam pembangunan yang dibuktikan dengan kriteria kemampuan yang sangat rendah dengan rata-rata rasio sebesar 10,47% selama lima tahun.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.1. di atas diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Nias terhadap pendapatan transfer mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Nias sebesar Rp70.892.624.000,00 atau setara dengan 13,48% dari total pendapatan transfer. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp82.840.434.000,00 atau 13,55%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp95.726.168.000,00 atau 15,96%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menempati angka Rp88.754.606.000,00 atau 14,50%. Pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp107.629.139.000,00 atau 17,31% dimana pada tahun ini merupakan rasio tertinggi selama lima tahun berturut-turut.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun berturut-turut masih rendah sekali, dimana pada tahun-tahun tersebut perkembangan rasio kemandiriannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan ada satu tahun yang mengalami penurunan tepatnya pada tahun 2018. Jika ditinjau dari rata-ratanya hanya memperoleh angka sebesar 14,96%.

Kemampuan rasio keuangannya masih tergolong belum mandiri yang memiliki pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif diartikan peran pemerintah pusat lebih dominan dalam mengambil bagian daripada daerah yang bersangkutan, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Nias tingkat kemandiriannya secara keseluruhan telah diambil alih oleh pendapatan transfer. Daerah bersangkutan dianggap tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara maksimal.

Menurut Rezki Anisa (dalam Abdul Halim, 2013) kriteria kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan tinggi jika rasionya 75-100% dengan pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sangat minim bahkan sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu serta mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, dikatakan sedang jika 50-75% dengan pola hubungan partisipatif yaitu campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah, dikatakan rendah jika angka 25-50% dengan pola hubungan konsultatif yaitu peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah sudah dianggap sedikit lebih mampu, dikatakan rendah sekali jika di angka 0-25% dengan pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan mengambil bagian daripada kemandirian pemerintah daerah. Daerah ini dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Sementara rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias berada di angka 14,96%, sehingga disebut pola hubungan instruktif dengan kemampuan keuangan yang rendah sekali.

Menurut Mahmudi (2019) semakin tinggi angka rasio yang dihasilkan menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya begitu juga dengan angka rasio yang rendah maka menunjukkan pemerintah daerah semakin rendah kemandirian keuangan daerahnya. Pendapat ahli di atas mendukung fakta yang terjadi dimana meningkat dan menurunnya kemandirian keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Nias ditentukan oleh rasio yang didapat per tahunnya.

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias secara keseluruhan berdasarkan rata-ratanya dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menunjukkan bahwa ada tingkat harapan dana yang tinggi terhadap sumber dana dari luar daerah termasuk dari pusat dan provinsi. Dengan kata lain daerah masih belum memaksimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Untuk mendapatkan PAD yang optimal harusnya memperhatikan sumber-sumber PAD itu sendiri. Untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan daerah diperoleh dengan partisipasi masyarakat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah, misalnya hasil penjualan daerah, komisi, penerimaan ganti rugi, bunga, jasa giro, dan lain-lain. PAD akan maksimal jika daerah mengoptimalkan dalam mengumpulkan penerimaan daerah yang disertai dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahima Br. Purba, Haryono Umar, Anggi Pratama Nasution, Nia Amelija SM (2020) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019 kemandirian keuangan memiliki rasio $< 25\%$ artinya rasio kemandirian keuangannya masih rendah

sekali. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Puput Risky Pramita (2015) Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong pola hubungan instruktif. Menurutnya penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama dengan alasan-alasan penyebab yang penulis cantumkan, dimana Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias masih terlalu mengharapkan dana-dana dari luar, serta tidak mengoptimalkan potensi daerah.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah terjadi yang disertai dengan penyebabnya, untuk meningkatkan kemampuan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias dalam membiayai pemerintah dan pembangunan serta meminimalkan keikutsertaan pusat dan provinsi, maka daerah wajib mengoptimalkan penerimaan daerah yang sudah ada, mendata serta memberi kemudahan izin bagi pemangku kepentingan orang pribadi atau badan, perusahaan daerah, aset daerah lainnya yang masih belum terdaftar sebagai penghasil dalam penerimaan daerah, serta berinisiatif untuk menganjurkan, mendukung bahkan membuka usaha masyarakat daerah termasuk dalam pendirian BUMD yang memang dinilai berpotensi tinggi dalam penerimaan daerah.

4.2.2. Derajat Kontribusi BUMD

Berdasarkan tabel 4.2. di atas perkembangan rasio derajat kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Nias selama lima tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar Rp9.562.922.000,00 dengan rasio tertinggi sebesar 13,48%, tahun 2016 menurun menjadi Rp9.501.203.000,00 atau 11,46%, tahun 2017 penerimaan laba BUMD naik menjadi Rp10.780.870.000,00 namun jika dibandingkan dengan PAD rasionya kembali menurun menjadi

11,26%, pada tahun 2018 penerimaan laba BUMD mulai membaik menjadi Rp11.688.733.000,00 secara rasio juga ikut naik menjadi 13,16%, namun penerimaan laba BUMD serta rasio tidak bertahan naik hingga tahun 2019 kembali menurun dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 10.052.196.000 atau 9,33% sebagai angka rasio terendah.

Perhitungan derajat kontribusi BUMD keuangan keuangan daerah selama lima tahun berturut-turut masih cukup baik, dimana pada tahun-tahun tersebut perkembangan rasio derajat kontribusi BUMD tidak mengalami penurunan yang terus menurun namun selama dua tahun mengalami peningkatan. Jika ditinjau dari rata-ratanya memperoleh angka sebesar 11,73% dan masih memperoleh nilai yang positif. Daerah bersangkutan dianggap tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara maksimal.

Derajat kontribusi BUMD merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengetahui tingkat partisipasi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah (Mahmudi 2019). Derajat kontribusi yang diharapkan adalah rasio yang terus meningkat setiap tahunnya dalam mendukung pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio derajat kontribusi BUMD semakin baik pula tingkat kontribusi daerah perusahaan milik daerah dalam menambah PAD.

Derajat kontribusi BUMD keuangan daerah Kabupaten Nias secara keseluruhan berdasarkan rata-ratanya dapat dikatakan baik, hal ini menunjukkan bahwa masih ada tingkat harapan terhadap dana hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dibandingkan PAD. Namun perlu juga diperhatikan Pemerintah

Daerah Kabupaten Nias untuk tidak lalai dengan kontribusi BUMD di angka yang sudah didapat di atas. Daerah perlu meningkatkan kontribusi daerah dalam menambah PAD, serta mengoptimalkan penerimaan agar penerimaan yang selalu positif disertai dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain daerah harus masih memaksimalkan kontribusi daerah dengan memperhatikan sumber-sumber hasil kekayaan daerah itu sendiri. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian lembaga Bank/non Bank, laba PDAM, laba penyertaan modal/investasi kepada pihak ke tiga serta sumber-sumber lainnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Theodora Sekar Andhika (2013) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 jika dilihat dari derajat kontribusi bumd keuangan daerah dinilai menurun. Menurutnya penyebab terjadinya hal tersebut karena dalam perkembangannya, BUMD di Pemerintahan Kota Yogyakarta sering mengalami kerugian dan bahkan mempunyai hutang. Namun pada penelitian ini derajat kontribusi BUMD Kabupaten Nias tidak sama dengan Kota Yogyakarta yang hanya mengalami penurunan terus menurun, namun juga mengalami kenaikan. Hal tersebut dinilai cukup baik karena memiliki rata-rata rasio 11,73% serta nilai yang selalu positif.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah terjadi yang disertai dengan penyebabnya, untuk meningkatkan derajat kontribusi keuangan daerah Kabupaten Nias, maka daerah wajib mengoptimalkan penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya menetapkan dan meningkatkan koordinasi besaran sumber penerimaan wajib dengan akurat dan teliti. Dengan hal ini diharapkan BUMD mampu lebih banyak dan maksimal memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

4.2.3. Rasio Keserasian

Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Nias terhadap total belanja sebesar 57,28%. Rasio belanja operasi mengalami penurunan dari tahun 2015-2017, dan kembali naik di tahun 2018-2019. Pada tahun 2015 rasio belanja operasi sebesar 64,01%, kemudian tahun 2016 menurun menjadi 55,26%, pada tahun 2017 menurun menjadi 52,79%, kemudian dua tahun berikutnya meningkat yaitu tahun 2018 sebesar 56,88% dan tahun 2019 sebesar 57,48%.

Dari tabel tersebut dilihat juga belum stabilnya belanja operasi, namun berdasarkan penilaian tersebut porsi belanja operasi terhadap total belanja sudah dikatakan memburuk karena kurang dari rasio 60%. Ukuran besarnya rasio belanja operasi terbaiknya di angka 60-90%, hal tersebut juga bukan suatu patokan mutlak karena besaran rasio operasi dipengaruhi oleh kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan besaran realisasi pendapatannya. Selama lima tahun berturut-turut, rasio belanja operasi memiliki rata-rata sebesar 57,28%, hampir mendekati 60% yang merupakan porsi belanja operasi terbaik suatu daerah.

Rasio belanja operasi terhadap total belanja tidak memiliki ukuran rasio yang pasti. Pengukuran rasio ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi mengenai besaran belanja daerah yang dialokasikan bagi belanja operasi. Porsi belanja operasi yang besar menginformasikan memiliki kecenderungan pendapatan yang lebih tinggi, dan tingkat pendapatan yang rendah menunjukkan juga porsi belanja operasi yang rendah.

Berdasarkan hasil rasio perhitungan pada tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Nias terhadap total

belanja sebesar 25,50%. Rasio belanja operasi memperlihatkan kecenderungan menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2015 rasionya memperoleh angka tertinggi sebesar 29,13%, tahun 2016 menurun menjadi 28,56%, tahun 2017 menjadi 27,15%, kemudian tahun 2018 sebesar 22,95% dan tahun 2019 sebesar 19,74% sebagai rasio terendah.

Berdasarkan penilaian tersebut porsi belanja modal terhadap total belanja sudah dikatakan baik hampir mendekati rasio 20%, walaupun ukuran rasio terbaiknya di angka 5-20% bukan suatu patokan mutlak karena besaran rasio modal dipengaruhi oleh kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan besaran realisasi pendapatannya. Perlu juga diketahui rata-rata rasio belanja modal Kabupaten Nias selama lima tahun sebesar 25,50% yang artinya rasionya berada di atas ukuran rasio terbaik pada umumnya.

Sama halnya dengan rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal juga tidak memiliki ukuran rasio yang pasti. Pengukuran rasio ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi mengenai besaran belanja daerah yang dialokasikan bagi belanja modal. Namun perbedaannya porsi belanja yang besar menginformasikan memiliki kecenderungan pendapatan yang lebih rendah dan tingkat pendapatan yang lebih rendah menunjukkan juga porsi belanja modal yang besar. Perbedaan ini disebabkan karena pemerintah daerah dengan pendapatan lebih rendah menyesuaikan untuk melakukan belanja modal sebagai sebagai unit dari pendanaan modal berjangka panjang (Mahmudi, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Puput Risky Pramita (2015) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen 2009-2013 jika dilihat dari rasio

keseerasiam belanja operasi dan belanja modal dinilai belum stabil dari tahun ke tahun, serta belanja operasinya lebih besar dari belanja modalnya. Penelitian yang dilakukan Juliana Dora (2017) Kinerja Keuangan Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 jika dilihat dari rasio keseerasian, belanja operasi mengalami penurunan, sementara belanja modalnya mengalami kenaikan, serta alokasi belanja didominasi oleh belanja operasi.

Berkaitan dengan kedua penelitian terdahulu, penelitian ini juga mengungkapkan hasil dengan rasio yang berbeda. Pada Pemerintahan Kabupaten Nias belanja operasinya cukup besar dengan rasio yang tidak stabil serta memiliki rata-rata sebesar 57,28% mendekati angka ukuran belanja operasi yang baik. Untuk belanja modal tiap tahunnya mengalami penurunan, memiliki rata-rata sebesar 25,50% melewati ukuran rasio belanja modal yang baik pada umumnya.

Berdasarkan dengan analisa di atas maka belanja keseerasian Kabupaten Nias disebut menurun, rata-rata belanja operasi kurang dari 60% dan rata-rata belanja modal lebih 20%. Dari hal di atas maka besaran untuk alokasi belanja operasi mengalami penurunan, sementara belanja alokasi modal mengalami kenaikan. Belanja operasi yang menurun serta belanja modal yang meningkat disimpulkan pemerintahan Kabupaten Nias memiliki pendapatan yang rendah untuk dialokasikan di bagian belanja daerah. Hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi belanja modal untuk dialokasikan ke belanja operasi, namun hal tersebut juga tidak cukup karena belanja memiliki ukuran kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya daerah perlu juga memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, dengan hal tersebut maka belanja akan terpenuhi secara harmonis.

4.2.4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Setelah dilakukan perhitungan dengan mengetahui rasio pertumbuhan pendapatan pada tabel 4.5. di atas diketahui bahwa selama empat tahun berturut-turut dari 2015-2018 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 rasio mengalami kenaikan. Untuk mencari rasio pertumbuhan maka dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pendapatan sebesar Rp691.021.858.000,00 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp515.836.195.000,00 sehingga memperoleh rasio sebesar 25,35%. Pada tahun 2016 pendapatannya sebesar Rp818.455.989.000,00 dengan rasio 15,57%. Tahun 2017 pendapatan sebesar Rp870.868.735.000,00 dengan rasio 6,01%, tahun 2018 sebesar Rp901.833.538.000,00 dengan rasio 3,43% dan untuk tahun 2019 pendapatan Rp964.445.047.000 dengan rasio 6,49%.

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan keuangan daerah selama lima tahun berturut-turut masih cukup baik, dimana pada tahun-tahun tersebut perkembangan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang terus menurun dari tahun 2015-2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali. Namun jika melihat dari pertumbuhan per tahunnya tanpa membandingkan dengan pertumbuhan pendapatan satu tahun sebelumnya maka memperoleh peningkatan selama lima tahun. Jika ditinjau dari rata-ratanya memperoleh angka sebesar 11,37% dan masih memperoleh hasil yang positif.

Analisis perhitungan pertumbuhan pendapatan berfungsi untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan rasio ini maka dapat mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang kurang dan

masih belum memperoleh perhatian. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan daerah dalam memperoleh nilai positif atau negatif selama beberapa periode dengan kecenderungan (*trend*) meningkat (Mahmudi, 2019). Dan benar saja pertumbuhan pendapatan Kabupaten Nias selalu memperoleh nilai positif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten Nias mampu dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Nias yang diukur dengan rasio pertumbuhan pendapatan dinilai cukup baik, memiliki rata-rata yang positif dengan *trend* yang selalu meningkat. Kecenderungan yang selalu meningkat dapat dipastikan tercapainya target atas penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah dipastikan juga bahwa daerah mampu membiayai belanja-belanja daerah tanpa mengalami kerugian.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lazyra KS (2016) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2011-2015 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan pendapatan Keuangan Daerah dinilai mengalami penurunan. Menurutnya penyebab terjadinya hal tersebut karena kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintahan Kota Medan. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Juliani Dora (2017) Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan positif. Menurut Juliana Dora penyebab terjadi pertumbuhan yang positif hampir sama dengan pada penelitian ini dimana pada Pemerintahan Kabupaten Nias dukungan penerimaan

pendapatan yang didapat selalu meningkat tiap tahunnya. Bagian sumber-sumber pendapatan selalu berkontribusi aktif dalam menunjang penerimaan pendapatan.

Selain dari hal-hal yang disebutkan di atas untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan maka bidang pariwisata dan teknologi merupakan sektor yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah. Kedua bidang tersebut sebagai penggerak aktivitas ekonomi, malah menjadi sebagai sumber pendapatan daerah serta menjadi strategi mewujudkan daya saing perekonomian daerah. Adapun strategi pariwisata yang harus dilakukan adalah membangun destinasi pariwisata, membangun industri pariwisata, membangun pemasaran serta kelembagaan keparawisataan. Di bidang teknologi informasi, jaringan dapat dimanfaatkan sebagai integrasi berbagai sistem, yang memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah secara cepat dan akurat. Teknologi di Pemerintahan Kabupaten Nias masih jauh dari kata maju, hal-hal yang perlu dibenahi terdapat pada teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi medis, teknologi konstruksi, teknologi pembelajaran, teknologi pengamanan data dan lain sebagainya.

4.2.5. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan tabel 4.6. di atas rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah merupakan cara merumuskan rasio ketergantungan daerah. Pada tahun 2015 pendapatan transfer sebesar Rp525.798.998.000,00 dengan rasio 76,09%, tahun 2016 sebesar Rp611.361.799.000 dengan rasio 74,69%, tahun 2017 sebesar Rp599.493.519.000,00 dengan rasio 68,83%, tahun 2018 sebesar Rp611.725.679.000 dengan rasio 67,83% dan tahun 2019 sebesar

Rp621.468.917.000,00 dengan rasio 64,43%. Rasio tertinggi berada pada tahun 2015, sementara pada tahun 2019 dengan rasio terendah.

Dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah rasio yang diharapkan merupakan rasio yang rendah. Rasio yang terus menurun juga merupakan hal yang baik dimana dapat diketahui berkurangnya tingkat ketergantungan keuangan daerah atas dana transfer per tahunnya terhadap total pendapatan daerah. Sementara hasil rasio-rasio tersebut masih menempati angka-angka ketergantungan yang berkriteria sangat tinggi. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias selama lima tahun berada lebih dari 50% sehingga rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi.

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 (dalam Samalua Waoma, 2018) kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan baik atau tidaknya tergantung pada rasionya. Jika rasionya 0,00-10,00% berada pada kriteria sangat rendah, artinya ketergantungan keuangan daerahnya sangat kecil/minim. Dikatakan kriteria rendah jika rasionya 10,01-20,00, dikatakan kriteria sedang jika rasionya 20,01-30,00%, dikatakan kriteria cukup jika rasionya 30,01-40,00%, dikatakan kriteria tinggi jika rasionya 40,01-50,00% dan jika rasionya berada di atas 50,00% maka disebut dengan kriteria yang sangat tinggi. Sementara untuk rasio ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Nias berada pada angka lebih besar dari 50,00%, sehingga hal tersebut rasio ketergantungannya disebut sangat tinggi.

Menurut Mahmudi (2019) semakin tinggi angka rasio ketergantungan yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer, begitu juga dengan angka rasio yang rendah maka menunjukkan pemerintah daerah semakin kecil ketergantungan keuangan daerahnya terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pendapat ahli di atas mendukung hasil yang sudah didapat dimana naik atau turunnya ketergantungan keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias ditentukan oleh rasio yang didapat per tahunnya. Dengan rasio yang tinggi maka ketergantungan Pemerintahan Kabupaten Nias terhadap dana transfer dinilai sangat tinggi.

Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias secara keseluruhan berdasarkan rasio per tahun dan rata-rata sebesar 70,34% selama lima tahun dikatakan sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat harapan akan ketergantungan dana yang tinggi terhadap sumber penerimaan dari luar daerah termasuk dari pusat dan provinsi. Untuk masalah tersebut pemerintah daerah perlu meningkatkan kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer. Sama halnya dengan rasio kemandirian keuangan daerah untuk mendapatkan PAD yang optimal harus memperhatikan sumber-sumber PAD termasuk partisipasi masyarakat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Samalua Waoma (2018) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan setiap tahunnya maupun ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat mulai berkurang. Rasio keuangan yang menurun menunjukkan bahwa kinerja keuangan mengalami

kenaikan per tahunnya. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Juliani Dora (2017) Kinerja Keuangan daerah pemerintahan Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi. Menurut Juliani Dora dan juga penelitian ini terjadinya hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kontribusi PAD, seharusnya dana dari PAD harus menyeimbangkan pendapatan transfer.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah terjadi yang disertai dengan penyebabnya, untuk menurunkan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias, maka daerah perlu mengoptimalkan kontribusi PAD, dengan cara memperluas dasar penerimaan, termasuk mengidentifikasi pembayar pajak potensial dalam penerimaan daerah.

4.2.6. Derajat Desentralisasi

Berdasarkan tabel 4.7. di atas derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Pada tabel perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Nias terkait desentralisasi fiskal dinilai kurang, pemerintah daerah Kabupaten Nias kurang dalam merealisasikan kewenangan dari pusat. Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

Dimulai pada tahun 2015 derajat desentralisasi fiskal pada pemerintahan Kabupaten Nias sebesar 10,25%, tahun 2016 sebesar 10,12%, tahun 2017 sebesar 10,99%, tahun 2018 sebesar 9,84% dan tahun 2019 sebesar 11,15%. Dari rasio tersebut didapat rasio tertinggi 11,15% di tahun 2019 dan rasio terendah 9,84% tahun 2018. Jika dilihat kecenderungan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan total

pendapatan daerah dinilai memiliki *trend* yang selalu meningkat tiap tahunnya dan pertumbuhan tersebut dinilai baik dalam penerimaan pendapatan. Namun dalam perhitungan derajat desentralisasi yang dibutuhkan dalam mengukur kinerja terletak pada rasionya yang memiliki kriteria khusus. Sementara jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi rata-ratanya memiliki angka sebesar 10,47% dimana angka tersebut rasio kinerjanya dinilai kurang.

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 (dalam Samalua Waoma, 2018) Kriteria derajat desentralisasi keuangan daerah dapat dipengaruhi besaran rasionya. Jika rasionya 0,0-10,00% disebut dengan kriteria sangat kurang, artinya sangat rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Dikatakan kriteria kurang jika rasionya 10,01-20,00, dikatakan kriteria sedang jika rasionya 20,01-30,00%, dikatakan kriteria cukup jika rasionya 30,01-40,00%, dikatakan kriteria baik jika rasionya 40,01-50,00% dan jika rasionya berada di atas 50,00% maka disebut dengan kriteria yang sangat baik. Sementara untuk derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten nias berada di kriteria kurang selama empat tahun dan sangat kurang satu tahun. Jika dihitung berdasarkan rata-ratanya yang memperoleh angka 10,47%, dengan hal tersebut dikatakan derajat desentralisasi di Pemerintahan Kabupaten Nias disebut kurang.

Menurut Mahmudi (2019) semakin tinggi kontribusi PAD yang dihasilkan maka semakin tinggi tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Dengan angka rasio yang rendah maka menunjukkan pemerintah daerah semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapat ahli di atas mendukung hasil yang sudah didapat dimana tinggi atau rendahnya derajat desentralisasi keuangan

Pemerintahan Kabupaten Nias ditentukan oleh tingkat rasio yang didapat per tahunnya, yang dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Desentralisasi fiskal keuangan daerah Kabupaten Nias secara keseluruhan berdasarkan rata-ratanya dapat dikatakan kurang, jauh dari kata cukup dan masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial daerah belum mencukupi yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di berbagai industri serta kemajuan daerah. Daerah belum memahami betul apa yang diperlukan dan bagaimana mencapai tujuan serta strategi tersebut untuk daerahnya. Desentralisasi fiskal belum berjalan optimal bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kurang berperan BUMD, pengelolaan pajak diambil alih pusat, menurunnya tarif pajak karena persaingan antar daerah untuk menarik investor, dan banyak dialokasikan untuk belanja yang sebenarnya diorientasikan untuk pembangunan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samalua Waoma (2018) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 dilihat dari derajat desentralisasi keuangan daerah mengalami fluktuasi ada yang menurun dan membaik. Hal tersebut disebabkan karena PAD tidak stabil, serta tidak mampu menyaingi total pendapatan daerah. Penelitian serupa dilakukan oleh Meliana Br. Ginting (2019) Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan tahun 2009-2017 jika dilihat dari derajat ketergantungan keuangan daerah cukup baik. Menurutnya dikatakan cukup baik karena PAD di kota Medan relatif tinggi dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Alasan lain disebutkan juga karena partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi

daerah sudah mulai membaik sehingga menyebabkan PAD berpengaruh besar dalam membiayai pembangunan di Kota Medan.

Derajat desentralisasi fiskal dari dua penelitian sebelumnya menyebutkan pada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan rasionya mengalami fluktuasi, sementara di Pemerintahan Kota Medan disebutkan rasionya cukup baik. Pada penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian yang berbeda disertai dengan penyebabnya. Pada Pemerintahan Kabupaten Nias tahun 2015-2019 jika dilihat dari derajat desentralisasi rata-rata rasionya disebut kurang hal ini karena pertumbuhan PAD yang lambat, sementara pertumbuhan pendapatan daerah yang lumayan meningkat. Selanjutnya disebabkan karena ukuran PAD yang selalu relatif kecil, sehingga tidak mampu menyumbang akan pendapatan daerah yang besar.

Berdasarkan masalah-masalah di atas yang disertai dengan penyebabnya, untuk meningkatkan derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Nias, maka daerah perlu mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan sosialisasi serta pemeriksaan pajak dalam kebijakan perluasan dan penggiatan pajak. Serta menetapkan batas atas dan batas bawah belanja untuk mendukung desentralisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015-2019. Dari hasil analisis kinerja keuangan ada beberapa yang dapat disimpulkan, antara lain:

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 secara keseluruhan memiliki pola hubungan instruktif dengan rata-ratanya 14,96% masih rendah sekali. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias masih terlalu mengharapkan dana-dana dari luar, serta tidak mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Untuk meningkatkan kemampuan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias maka perlu mengoptimalkan penerimaan daerah yang sudah ada, mendata serta memberi kemudahan izin bagi pemangku kepentingan orang pribadi/badan, kemudahan izin perusahaan daerah atau aset daerah lainnya yang masih belum terdaftar, serta berinisiatif untuk menganjurkan dan mendukung bahkan membuka usaha masyarakat daerah termasuk pendirian BUMD yang memang dinilai berpotensi tinggi dalam penerimaan daerah.
- b. Derajat kontribusi BUMD Keuangan Daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, berdasarkan rata-ratanya memperoleh 11,73% disebut baik, karena memiliki rasio tiap tahunnya positif. Adanya rasio yang berfluktuatif disebabkan karena penerimaan bagian laba BUMD yang tidak stabil. Untuk meningkatkan derajat kontribusi keuangan daerah Kabupaten Nias, maka daerah perlu mengoptimalkan penerimaan hasil kekayaan daerah

yang dipisahkan, misalnya menetapkan dan meningkatkan koordinasi besaran sumber penerimaan wajib dengan akurat dan teliti. Dengan hal ini diharapkan BUMD memiliki kemampuan lebih dan maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

- c. Rasio Keserasian Keuangan Daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Rasio belanja operasi tiap tahunnya tidak stabil, berdasarkan rata-ratanya sebesar 57,28%. Sementara rasio belanja modal tiap tahunnya mengalami penurunan serta memiliki rata-rata sebesar 25,50%. Dengan hal tersebut besaran untuk alokasi belanja operasi mengalami penurunan, sementara belanja alokasi modal mengalami kenaikan. Belanja operasi yang menurun serta belanja modal yang meningkat disimpulkan pemerintahan Kabupaten Nias memiliki pendapatan yang rendah untuk dialokasikan di bagian belanja daerah. Hal yang perlu dilakukan daerah adalah mengurangi belanja modal untuk meningkatkan belanja operasi serta memaksimalkan penerimaan daerah agar segala kebutuhan belanja dapat tercukupi.
- d. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 jika ditinjau dari rata-ratanya selama lima tahun yang memperoleh angka sebesar 11,37% dikategorikan cukup baik dimana masih memperoleh hasil yang positif dengan pendapatan yang selalu meningkat. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Nias harus mampu dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari tahun-tahun sebelumnya agar bagian sumber-sumber pendapatan selalu berkontribusi aktif dalam menunjang penerimaan pendapatan.

- e. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 mengalami penurunan tiap tahunnya namun jika dilihat berdasarkan rata-rata rasionya menempati angka sebesar 70,34% masih tergolong pada kriteria sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kontribusi PAD, yang seharusnya dana dari PAD mampu menyeimbangkan pendapatan transfer. Untuk menurunkan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias, maka daerah perlu mengoptimalkan kontribusi PAD, dengan cara memperluas dasar penerimaan, termasuk mengidentifikasi pembayar pajak potensial dalam penerimaan daerah.
- f. Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Nias tahun 2015-2019 memiliki rata-rata sebesar 10,47% dinilai kurang dan belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan PAD yang lambat, sementara pertumbuhan pendapatan daerah yang meningkat. Hal lainnya disebabkan karena ukuran PAD yang selalu relatif kecil, sehingga tidak mampu menyumbang pendapatan daerah. Untuk meningkatkan derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Nias, maka daerah perlu mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan sosialisasi serta pemeriksaan pajak dalam kebijakan perluasan dan penggiatan pajak. Serta menetapkan batas atas dan batas bawah belanja untuk mendukung desentralisasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Pada bagian pendapatan Pemerintah Kabupaten Nias diharapkan meningkatkan sumber-sumber PAD, hal tersebut mampu mempertahankan dan memajukan

kemandirian keuangan daerah, dana BUMD maksimal, pertumbuhan pendapatan yang meningkat, ketergantungan dari dana eksternal berkurang, serta desentralisasi fiskal yang lebih maksimal.

- b. Pada bagian belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Nias diharapkan mampu mengharmonisasikan alokasi belanja, yaitu meningkatkan belanja operasi dan mengurangi belanja modal agar lebih seimbang.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan lebih mendalami pengukuran kinerja keuangan daerah agar mendapatkan hasil yang lebih rinci, lebih akurat serta lebih handal. Adapun yang perlu dilakukan yakni dengan menambah jangka waktu tahun penelitian, menambah beberapa rasio penelitian dan memperluas lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Andhika, Theodora Sekar (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Berdasarkan Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Yogyakarta*.
- Annisa, Rezki (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Pemerintahan Kota Binjai Tahun 2013-2017*.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Bpk Sumatera Utara. 2020. *Lkpd Kabupaten Nias*.
<https://sumut.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lkpd/lkpd-kabupaten-nias/>
- Dora, Juliani (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*
- Faud, Moh. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ginting, Meliana Br (2019) *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan*
- Lazyra, Ks (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta
- Moheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Ketiga. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nasution, N. A., & Oktari, A. (2021). Pengaruh Cash Flow, Account Receivable Turnover, Modal Kerja Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 91-115.
- Paramita, Puput Risky (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2013*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005, Pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Purba, R., Umar, H., Nasution, A., & Sm, N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Scenario (Seminar Of Social Sciences Engineering And Humaniora), 61-71. Retrieved From <Http://Jurnal.Pancabudi.Ac.Id/Index.Php/Scenario/Article/View/1158>

Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(1), 60-70.

Sari, P. B. (2020). Analisis Opini Going Concern Pada Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia (Multiple Correlation Method). Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 10(1), 189-196.

Sugiyono. 2015. *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Ugm Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Waoma, Samalua (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Dalam Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan*

Widarta. 2010. *Otonomi Daerah Bermakna Kebebasan Dan Kemandirian Daerah Dalam Penentuan Langkah-Langkah Sendiri*. Bandung.